



LAPORAN KINERJA

INTERIM TRIWULAN I TAHUN 2025

BALAI POM DI TASIKMALAYA

 085888100533



 Balai POM di Tasikmalaya



bpom.tasikmalaya



(0265) 5305282



bpom_tasikmalaya@pom.go.id



bpomtasikmalaya

KATA PENGANTAR

KEPALA BALAI POM DI TASIKMALAYA



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat Rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Tasikmalaya triwulan I tahun 2025 dapat diselesaikan. Tahun 2025, merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra tahun 2025-2029. Pada triwulan I tahun 2025, terdapat berbagai isu strategis, baik dari sisi internal maupun eksternal, yang turut memengaruhi capaian kinerja Balai POM di Tasikmalaya. Namun demikian, berbagai tantangan tersebut tidak menjadi hambatan, melainkan dijadikan sebagai peluang untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka menjamin mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025, disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai POM di Tasikmalaya Triwulan I Tahun 2025 ini. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan kinerja ini memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Tasikmalaya kepada para pemangku kepentingan, dengan memuat informasi mengenai keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran; serta
2. Sebagai media perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk meningkatkan kinerja ke depan, baik melalui penyempurnaan regulasi maupun optimalisasi alokasi sumber daya yang dimiliki.

Capaian kinerja Balai POM di Tasikmalaya pada Triwulan I Tahun 2025 secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Meski demikian, masih terdapat hambatan-hambatan yang menjadi catatan penting untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada triwulan-triwulan berikutnya.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, serta mendorong peningkatan kinerja seluruh sumber daya yang dimiliki Balai POM di Tasikmalaya demi meraih capaian yang lebih optimal pada periode berikutnya

Tasikmalaya, 29 April 2025

Kepala Balai POM di Tasikmalaya,



Iltizam Nasrullah, S.Si, Apt., M.Si

RINGKASAN/ IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Balai POM di Tasikmalaya triwulan I tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban serta Akuntabilitas kinerja Balai POM di Tasikmalaya kepada publik/pemberi mandat.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, yaitu: 1). Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu, 2). Terwujudnya Masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu, 3). Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM, 4). Terwujudnya perlindungan Masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, 5). Terwujudnya organisasi yang professional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan public yang prima.

Tujuan tersebut menjadi arahan bagi Balai POM di Tasikmalaya dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra 2025-2029, untuk mencapai tersebut maka Balai POM di Tasikmalaya, menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yaitu:

Sasaran

Strategis

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
8. Layanan Publik UPT yang Prima
9. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pada triwulan I tahun 2025, dari 9 Sasaran Strategis yang ditetapkan, hasil capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar, sebesar 121,21% (Tidak Dapat Disimpulkan);
- Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM belum terdapat capaian pada triwulan I ini;
- Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, sebesar 133,33% (Tidak Dapat Disimpulkan);
- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, belum terdapat capaian pada triwulan I ini;
- Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar, sebesar 105,88% (sangat baik);
- Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu, sebesar 160% (tidak dapat disimpulkan);
- Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 107,53% (sangat baik);
- Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 125% (tidak dapat disimpulkan);
- Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 110,34% (sangat baik);
- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebesar 117,65% (sangat baik);
- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, sebesar 123,26% (tidak dapat disimpulkan);

2. Pada sasaran kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum terdapat capaian pada triwulan I ini;

3. Pada sasaran kegiatan ketiga yaitu “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL, sebesar 102,86% (tidak dapat disimpulkan)
4. Pada sasaran kegiatan keenam yaitu “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, sebesar 98,69% (Cukup)
 - Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman, belum terdapat capaian pada triwulan I ini;
 - Jumlah desa pangan aman, belum terdapat capaian pada triwulan I ini;
 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas belum terdapat capaian pada triwulan I ini;
5. Pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, sebesar 97,25% (cukup)
6. Pada sasaran kegiatan ketiga yaitu “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, sebesar 141,65 (Tidak dapat disimpulkan)
7. Pada **sasaran** kegiatan kelima yaitu “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, sebesar 100 (Baik);
8. Pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu “Layanan Publik UPT yang prima” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Indeks Pelayanan Publik UPT, belum terdapat capaian pada triwulan I ini;

9. Pada sasaran kegiatan kesembilan yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, belum terdapat capaian pada triwulan I ini;
- Nilai AKIP UPT BPOM, belum terdapat capaian pada triwulan I ini;
- Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, belum terdapat capaian pada triwulan I ini;
- Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, belum terdapat capaian pada triwulan I ini.

Hasil pencapaian kinerja Balai POM di Tasikmalaya pada triwulan I Tahun 2025, dari 9 sasaran kegiatan terdapat sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan kriteria baik yaitu **“Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”**, **“Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”** dan **“Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”** sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan kriteria sangat baik yaitu **“Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”**, **“Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”**, dan **“Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”**. Sementara itu, 3 (tiga) sasaran lainnya belum dilakukan pengukuran pada periode ini.

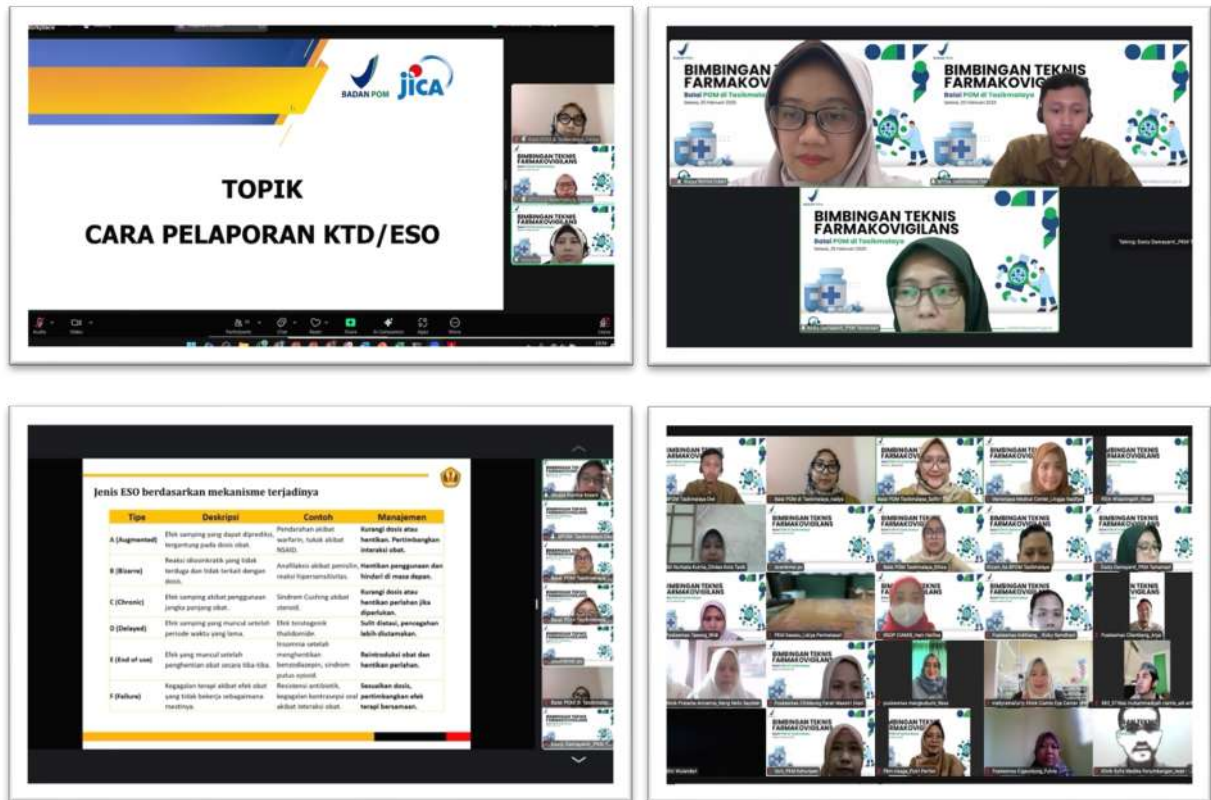
Pada tahun 2025 Balai POM di Tasikmalaya memperoleh anggaran sebesar Rp. 36.430.090.000,- (Tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) (DIPA Awal). Pada tanggal 22 Februari 2025 Balai POM di Tasikmalaya melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp 31.473.643.000,00- (Tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya menjadi Rp.4.956.447.000,- (Empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2025 terdapat relaksasi anggaran sebesar Rp. 1.018.279.000,- (Satu milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya menjadi Rp.5.974.726.000 (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran pada triwulan I 2025 adalah sebesar Rp. 1.313.449.412,- (Satu milyar tiga ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) demikian nilai capaiannya 21.98%. Berdasarkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

berdasarkan indikator Sasaran kegiatan secara kumulatif masuk dalam kategori tidak efisien dengan nilai $TE = 31,24..$

HIGHLIGHT KINERJA

Selama triwulan I tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya telah melaksanakan beberapa kegiatan dan mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya yaitu:

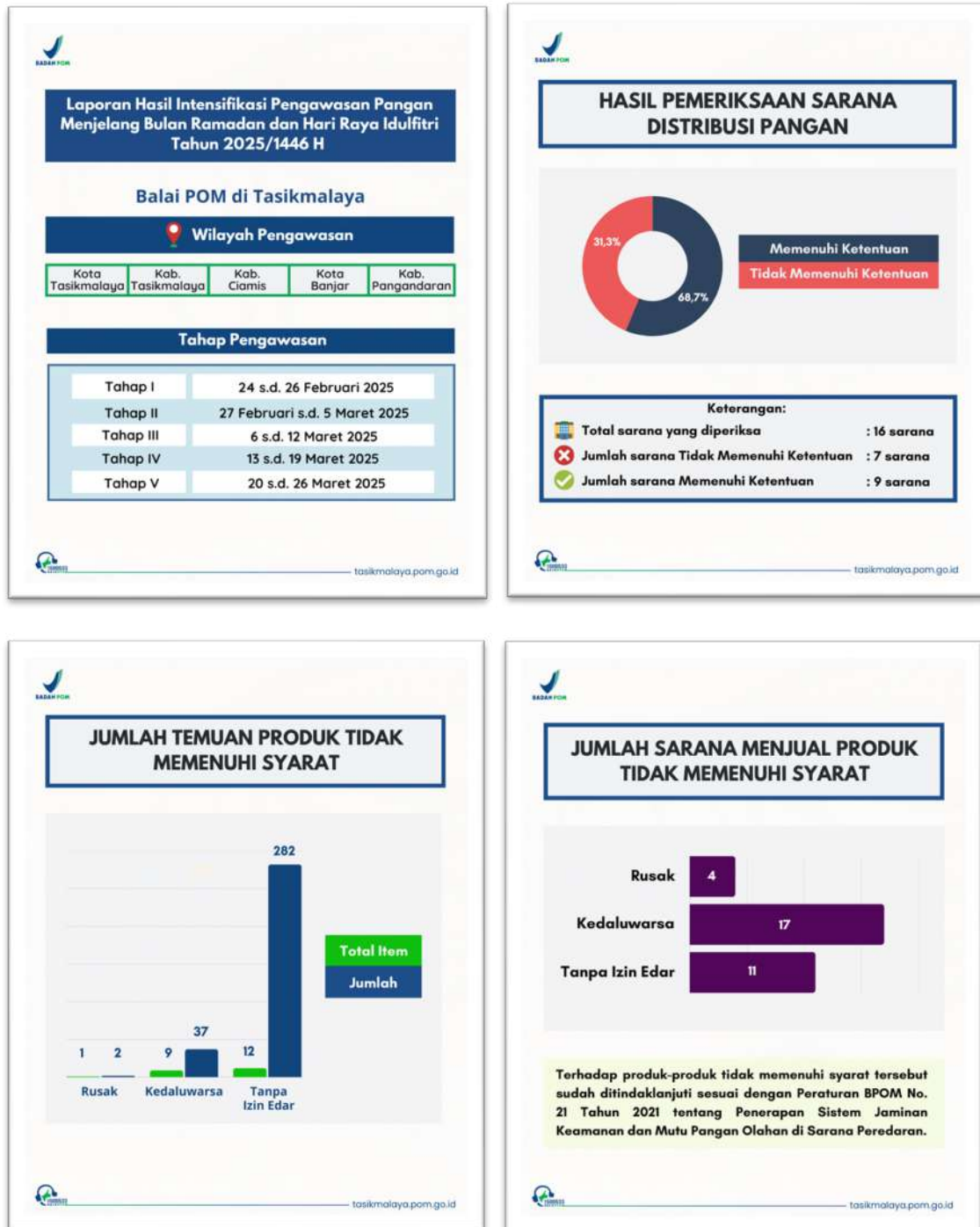
1. Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan kegiatan **Bimbingan Teknis Farmakovigilans** pada tanggal 25 Februari 2025



2. Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan kegiatan **Komunikasi, Informasi, dan Edukasi** dengan tema "Menuju Pangan Olahan Berkualitas: Penerapan CPPOB, Pendaftaran, dan Kemasan yang Tepat untuk Pelaku Usaha" pada tanggal 20 Maret 2025.



3. Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan kegiatan **Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025/1446 H**. Kegiatan ini dilaksanakan beberapa tahap mulai dari bulan Februari dan berakhir di bulan Maret.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	II
Ringkasan Eksekutif	IV
Highlight Kinerja	IX
Daftar Isi	XI
Daftar Tabel	XII
Daftar Gambar	XIV
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Analisis Lingkungan Strategis Internal	4
1.4 Analisis Lingkungan Strategis Eksternal	5
1.5 Struktur Organisasi	6
1.6. Isu Strategis Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	26
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	33
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024	35
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya tahun 2024	37
2.5 Metode Pengukuran	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	42
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	96
3.3 Realisasi Anggaran	105
BAB IV PENUTUP	111
4.1 Kesimpulan	111
4.2 Saran	111
LAMPIRAN	113
Lampiran 1. Rencana Kerja Tahunan Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025	113
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025	119
Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2024	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Tasikmalaya 2025	32
Tabel 2. Rencana Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2024.....	33
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025.....	36
Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2023	37
Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja	41
Tabel 6. Perbandingan Target, Realisasi dan Persentase Capaian dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025.....	42
Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Triwulan I Tahun 2024.....	45
Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025	47
Tabel 9. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2024 terhadap target tahunan “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”.....	48
Tabel 10. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025	51
Tabel 12. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”.....	52
Tabel 12. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025	55
Tabel 13. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	56
Tabel 14. Capaian Kinerja Indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” Triwulan I Tahun 2025.....	59
Tabel 15. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder”	60
Tabel 16. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025	62
Tabel 17. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	63
Tabel 16. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025	65
Tabel 19. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	66
Tabel 20. Capaian Kinerja Indikator “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025	68
Tabel 19. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	69
Tabel 22. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025	71
Tabel 23. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”	72
Tabel 22. Capaian Kinerja Indikator “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025	74
Tabel 23. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan”	75

Tabel 26. Capaian Kinerja Indikator “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” Triwulan I Tahun 2025	77
Tabel 27. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium”	78
Tabel 26. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Triwulan II Tahun 2024	80
Tabel 27. Capaian Kinerja Indikator “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” yang dilaksanakan triwulan I tahun 2025	81
Tabel 28. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”	82
Tabel 29. Capaian Kinerja Indikator “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” yang dilaksanakan triwulan I tahun 2025	86
Tabel 30. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”	87
Tabel 31. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Triwulan I Tahun 2025	89
Tabel 32. Capaian Kinerja “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT” Triwulan I 2025	89
Tabel 33. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT”	90
Tabel 34. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-7 Triwulan I Tahun 2025	91
Tabel 35. Capaian Kinerja Indikator “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar” Triwulan I Tahun 2025	92
Tabel 33. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT”	93
Tabel 39. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun 2025	96
Tabel 73. Realisasi Anggaran Balai POM di Tasikmalaya Triwulan I Tahun 2025	106
Tabel 41. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2024	107
Tabel 42. Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun Anggaran Triwulan I Tahun 2025	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya.....	6
Gambar 2. Struktur Organisasi	7



BADAN POM

BAB I **PENDAHULUAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Pada Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja disusun melalui pelaksanaan penyelenggaraan SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Balai POM di Kota Tasikmalaya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, melakukan penyusunan Laporan Kinerja Interim disetiap triwulan dan tahunan di setiap awal tahun. Penyusunan laporan kinerja di Balai POM Tasikmalaya ini biasanya berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkup Badan POM yang mengacu pada keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan laporan kinerja ini diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan bisa menjaui acuan untuk Balai POM di Tasikmalaya untuk bisa meningkatkan capaian kinerja dan mempunyai kinerja yang lebih baik lagi di tahun selanjutnya.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan

POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Balai POM di Tasikmalaya merupakan UPT Badan POM yang beralamat di Jl. Dinding Ari Raya No. 11 Bumi Resik Panglayungan, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUDUKAN

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya merupakan UPT BPOM yang dipimpin oleh Kepala, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

TUGAS

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 19 tahun 2023 Pasal 3, Balai POM di Tasikmalaya sebagai UPT BPOM memiliki tugas pokok sebagai berikut: UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat

dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 29 tahun 2023 Pasal 4, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3, Balai POM di Tasikmalaya sebagai UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Analisis Lingkungan Strategis Internal

ANGGARAN

Pada tahun 2025 Balai POM di Tasikmalaya memperoleh anggaran sebesar Rp. 36.430.090.000,- (Tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) (DIPA Awal). Pada tanggal 22 Februari 2025 Balai POM di Tasikmalaya melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp 31.473.643.000,00- (Tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya menjadi Rp.4.956.447.000,- (Empat milyar

sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2025 terdapat relaksasi anggaran sebesar Rp. 1.018.279.000,-(Satu milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya menjadi Rp.5.974.726.000 (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Tasikmalaya sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Balai POM di Tasikmalaya adalah sebanyak 37 pegawai (dua puluh orang laki-laki dan tujuh belas orang perempuan). Dari total tersebut, 23 (dua puluh tiga) pegawai merupakan PNS, 2 (dua) pegawai merupakan PPPK, 2 (dua) pegawai lainnya merupakan Pegawai PPNPN dan 10 (sepuluh) pegawai lainnya merupakan Pegawai outsourcing.

SARANA DAN PRASARANA

Sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Balai POM di Tasikmalaya saat ini menempati kantor sementara yang berlokasi di Jl. Dinding Ari Raya No. 11 Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec.Cipedes, Kota Tasikmalaya. Adapun status kantor adalah sewa dengan luas tanah sekitar $\pm 400 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 100 \text{ m}^2$. Jumlah kantor yang dimiliki yaitu sebanyak 2 gedung. Gedung pertama adalah Gedung operational staff yang terdiri dari Ruang Kepala Balai POM, Ruang Staf, Ruang Pelayanan Publik, Gudang, Toilet, Dapur, Mushola. Gedung yang kedua adalah Gedung Laboratorium. Terkait tanah yang akan dijadikan kantor Balai POM di Tasikmalaya sedang berproses dalam hal hibah tanah dari Pemda Kota Tasikmalaya.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis Eksternal

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya terdiri dari 5 kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu Kota

Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.



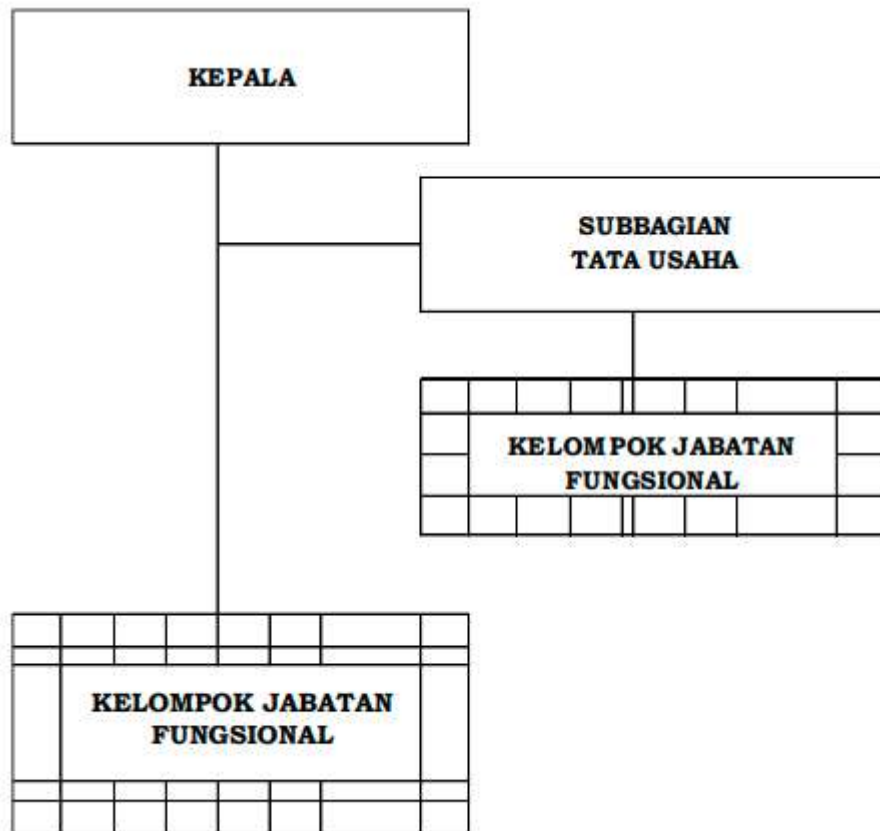
Catchment Area Balai POM di Tasikmalaya

Gambar 1. Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya

Luas wilayah kerja pengawasan Balai POM di Tasikmalaya secara keseluruhan adalah 6142,3 km² atau 17,36% dari luas wilayah provinsi Jawa Barat (35.378 km²). Adapun jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota seperti yang terlihat seluruh wilayah kerja dapat dijangkau melalui transportasi darat (100%). Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja berada di antara 0-6 jam.

1.5. Struktur Organisasi

Balai POM di Tasikmalaya dipimpin oleh 1 orang Kepala yang membawahi kelompok jabatan fungsional dan 1 orang kepala sub bagian umum yang membawahi kelompok jabatan fungsional. sesuai Perka Badan POM No. 19 Tahun 2023.



Gambar 2. Struktur Organisasi

1.6. Isu Strategis Organisasi

Dalam perjalanan RPJMN 2025-2029, Balai POM di Tasikmalaya menetapkan rencana strategis yang tepat, efektif dan akurat berlandaskan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity dan threat). Melalui metode ini, organisasi dapat mengidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Balai POM di Tasikmalaya dan juga peluang serta ancaman eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi di kemudian hari.

1.6.1 Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Tasikmalaya, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Tasikmalaya keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai POM di Tasikmalaya di masa depan. Berikut ini adalah

kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Tasikmalaya, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan Balai POM di Tasikmalaya mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan BPOM tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan BPOM berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Komitmen yang kuat dari kepemimpinan BPOM menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan Kepemimpinan yang efektif menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan, mempromosikan kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan. Komitmen kepemimpinan Balai POM di Tasikmalaya atas kolaborasi ditunjukkan dengan jumlah kerja sama aktif BPOM yang dibina sampai dengan 2024 sebanyak 3 kerja sama yang terdiri dari pemerintah daerah dalam sektor pelayanan publik dan institusi pendidikan.

Selain itu komitmen pemanfaatan teknologi Balai POM di Tasikmalaya terlihat dengan digitalisasi seluruh pengawasan baik pre-market dan post-market yang saling terintegrasi dan adanya interoperabilitas antar data dalam kerangka Satu Data BPOM.

Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan BPOM tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan industri terhadap lembaga. Dengan demikian, kepemimpinan Balai POM di Tasikmalaya telah memposisikan organisasi sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang ketat, adil, dan transparan, serta

merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang obat dan makanan. Beberapa penghargaan yang diperoleh Balai POM di Tasikmalaya sebagai bukti nyata komitmen untuk terus berkembang adalah sebagai berikut:

- a. UPT dengan kualifikasi “Informatif” berdasarkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024
- b. Terbaik ke-2 unit kearsipan III dengan kategori AA tahun 2023
- c. 10 Satker dengan respon tercepat dan lengkap dalam pengiriman laporan BMN untuk semester I tahun 2023

2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

Balai POM di Tasikmalaya telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, asosiasi profesi, pelaku usahabat dan makanan, Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Balai POM di Tasikmalaya dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, Balai POM di Tasikmalaya dapat memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya.

3. Memiliki SDM yang Kompeten

Sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Upaya peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi keahlian, penguasaan teknologi terkini, serta pembinaan yang mendukung pengembangan profesionalisme dan integritas. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, Balai POM di Tasikmalaya memiliki 9 jabatan fungsional dengan spesialisasi jabatan yang spesifik. Sampai dengan Tahun 2024 terdapat 25 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Balai POM di Tasikmalaya	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	3
4.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	13
5.	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	1

6.	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	1
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Petama	1
8.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
9.	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
10.	Pranata Komputer Terampil	1
11.	Operator Layanan Operasional	1

4. Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal

Pelayanan publik yang optimal berfokus pada kemudahan akses, kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Komitmen Balai POM di Tasikmalaya dalam menjamin kualitas pelayanan publik dengan melaksanakan evaluasi secara berkala dan memberikan wadah untuk saran dan kritik demi peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal. Inovasi dalam lingkup pelayanan publik menjadi salah satu indikator bahwa Balai POM di Tasikmalaya mengedepankan pelayanan publik yaitu adanya program Ngulisik dan Jelantik (Nguji Nguriling Balai POM di Tasikmalaya dan Jemput Bola Layanan Balai POM di Tasikmalaya). Inovasi ini berfokus pada pelayanan jemput bola langsung ke masyarakat serta pemberian akses informasi berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi seputar obat dan makanan melalui scan QR Code. Selain, Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha obat dan makanan dalam bentuk pelayanan desk sertifikasi dan desk registrasi yang mampu menghasilkan izin/rekomendasi serta izin edar yang diterbitkan pada hari yang sama menjadi bukti pencapaian Balai POM di Tasikmalaya dalam penyederhaan perizinan berusaha.

5. Kelembagaan yang Diperkuat

Kelembagaan yang kuat diwujudkan melalui struktur organisasi yang jelas, koordinasi antarunit yang efektif, serta regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas. Peningkatan kapasitas kelembagaan mencakup penyesuaian kebijakan, alokasi anggaran yang memadai, dan sinergi dengan lembaga terkait untuk memperkuat peran pengawasan.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendukung efisiensi dan transparansi pengawasan, termasuk melalui sistem digitalisasi data, pelacakan produk, layanan perizinan daring, dan pemantauan real-time. Pemanfaatan teknologi juga membantu

meningkatkan kecepatan respon terhadap risiko dan memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

1.6.2. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Balai POM di Tasikmalaya tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Tasikmalaya menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai POM di Tasikmalaya dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas sesuai analisa beban kerja

Balai POM di Tasikmalaya memiliki gap dalam pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM sesuai dengan analisa dari beban kerja. Hal ini membatasi tugas dan fungsi Balai POM di Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat untuk mengawasi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Selain itu gap SDM dapat menghambat optimalisasi kemampuan masing-masing SDM untuk berkontribusi pada organisasi dikarenakan memiliki beban kerja yang berlebih.

2. Sarana dan Prasarana belum memadai

Kondisi eksisting saat ini Balai POM di Tasikmalaya belum memiliki gedung kantor maupun laboratorium sendiri. Karena keterbatasan ini, pelayanan yang diberikan oleh Balai POM di Tasikmalaya menjadi kurang optimal. Selain bangunan kantor, Balai POM di Tasikmalaya juga masih belum memenuhi standar dan prasarana sesuai dengan Peraturan Badan POM nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Sarana Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM hal tersebut dapat berdampak pada pencapaian kinerja menjadi tidak maksimal.

3. Pemanfaatan Sistem TI kurang optimal

Berkembang pesatnya sistem TI di masa sekarang berdampak pada munculnya banyak inovasi-inovasi berbasis pada sistem TI namun dengan bertambahnya jumlah tersebut tidak diiringi dengan pemanfaatan sistem yang optimal. Masih banyaknya

kendala dalam pengembangan sistem TI mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan pada masyarakat.

4. Kemampuan uji laboratorium belum maksimal.

Dengan banyaknya peredaran produk obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya maka harus diiringi dengan pengawasan post market yang maksimal, salah satu faktor dalam pengawasan post market diantaranya yaitu dengan melakukan pengujian laboratorium. Pengujian di laboratorium Balai POM di Tasikmalaya belum maksimal dikarenakan keterbatasan pada pemenuhan standar kemampuan laboratorium. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, standar kemampuan laboratorium Balai POM di Tasikmalaya sebesar 40.38%. Faktor utama dalam pemenuhan SKL diantaranya yaitu ketersediaan peralatan laboratorium yang memadai dan SDM pengujian yang kompeten.

5. Akses transportasi yang masih terbatas

Masih terdapat daerah di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya yang sulit di akses. Secara geografis wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya terdiri dari pantai dan pegunungan, di daerah-daerah tertentu akses transportasi hanya bisa dilalui oleh kendaraan pribadi. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai Obat dan Makanan yang aman, serta membatasi proses pengawasan obat dan makanan oleh Balai POM di Tasikmalaya.

1.6.3. Peluang (Opportunity)

Komponen peluang (opportunity) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BPOM untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BPOM untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Pertumbuhan Pasar dan Perkembangan UMKM Obat dan Makanan yang sangat pesat di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar

memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BPOM kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BPOM dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

BPOM memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri di pasar internasional. Melalui penerapan standar produksi yang ketat, seperti *Good Manufacturing Practice* (GMP), BPOM dapat mendorong industri dalam negeri untuk tidak hanya memenuhi tetapi melebihi standar internasional. Langkah ini mencakup pelatihan terstruktur, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk produsen dalam negeri agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, manajemen kualitas, dan keamanan produk. Dengan demikian, BPOM tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri obat dan makanan, membantu mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas.

Dari perspektif strategis, upaya BPOM dalam meningkatkan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar ekspor, industri dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Kedua, komitmen terhadap standar internasional dalam produksi obat dan makanan memastikan bahwa masyarakat luas mendapatkan akses terhadap produk yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah. Selain itu, posisi industri obat dan makanan Indonesia yang kuat di pasar global akan memperkuat reputasi negara sebagai produsen obat dan makanan yang bertanggung jawab dan inovatif, mempromosikan keunggulan kompetitif di tingkat internasional.

2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

BPOM berhasil mengintegrasikan aplikasi yang ada di BPOM sebanyak 113 aplikasi sejak tahun 2019-2024. Pengintegrasian yang dimaksud adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan obat dan makanan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi sistem informasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari beberapa komponen pengintegrasian, yaitu Terintegrasi dengan OSS, Web Reg, Single Sign On, Tampilan Data Terintegrasi (BCC), E-Payment, KSWP, Data Lake, Gateway COVID, TTE, dan integrasi lainnya yang melibatkan lebih dari 1 aplikasi.

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI)

dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

3. Membangun Networking yang kuat dengan pemangku kepentingan

Peluang BPOM untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini.

Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan, sementara kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu BPOM menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan BPOM, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat dan makanan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional,

BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

4. Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu semakin meningkat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Indeks efektivitas KIE diperoleh melalui survei efektivitas KIE kepada responden yang pernah menerima KIE BPOM. Capaian indeks efektivitas KIE pada kurun waktu Tahun 2019-2023 terus meningkat, Pada tahun 2023, indeks efektivitas KIE mencapai 94,42 atau berada pada kategori Sangat Efektif. Berdasarkan capaian indeks efektivitas KIE tahun 2019-2023 terlihat bahwa terjadi peningkatan untuk setiap komponen indikatornya.

Indikator yang paling tinggi kontribusinya adalah Indikator Pemahaman yang artinya peserta KIE dapat memahami materi KIE yang diberikan, sedangkan indikator yang memiliki indeks terendah adalah minat yang artinya perlu ditingkatkan lagi upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam KIE Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan KIE baik dari konsep kegiatan, materi/konten, narasumber, media yang dipilih dan lain-lain.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan

BPOM untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

1.6.4. Ancaman (Threat)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (Threat) yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang.

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (society 5.0) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap platform e-commerce berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem user generated content (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan

peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui ecommerce. Dengan demikian, BPOM dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Dinamika pasar yang cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang

terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. Koordinasi antar lembaga belum sinergis

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM. Manajemen informasi antarlembaga juga menjadi krusial, dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Membangun sistem manajemen informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data secara real-time adalah solusi yang ideal, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit. Kurang efektifnya koordinasi BPOM dengan lintas sektor (antar lembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan BPOM dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik BPOM.

Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan tahun 2023, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 23 pada tingkat Provinsi (67,55%) dan 214 pada tingkat Kabupaten/Kota (41,63%). Data ini menunjukkan pada tingkat daerah belum memiliki koordinasi yang kuat dan berpotensi meningkatkan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman ini, perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif demi kepentingan pengawasan Obat dan Makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan multidimensi yang harus dikelola dengan cermat. Di satu sisi, masyarakat mungkin resisten terhadap perubahan yang membatasi pilihan atau akses mereka terhadap produk obat dan makanan tertentu. Perubahan perilaku konsumen, kepercayaan terhadap regulasi, serta persepsi risiko dan manfaat, semua berkontribusi terhadap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi negatif dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan kesehatan publik yang diinginkan.

Di sisi lain, penerimaan industri terhadap kebijakan tersebut juga penting. Kebijakan dapat dilihat sebagai pembatasan yang mengurangi profitabilitas atau menghambat inovasi dalam industri obat dan makanan. Tantangan dalam memastikan kepatuhan industri, terutama mengingat keragaman kapasitas antara perusahaan besar hingga UMKM, memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam formulasi kebijakan. Kebutuhan adaptasi yang mungkin memerlukan perubahan dalam proses produksi, pengemasan, atau pemasaran, serta investasi besar atau perubahan signifikan dalam waktu singkat, menambah kompleksitas dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif tetapi juga realistis untuk diikuti oleh industri. Resistensi dari industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat proses inovasi dan pertumbuhan ekonomi dalam sektor obat dan makanan. Oleh karena itu, menciptakan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan industri merupakan salah satu tantangan terbesar bagi BPOM, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi ancaman serius dalam analisis SWOT lembaga.

5. Krisis kesehatan global

Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam konteks analisis SWOT. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas BPOM dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan

lembaga ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi dan menyetujui obat-obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Hal ini menuntut BPOM untuk memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mengatasi prioritas yang berubah-ubah.

Selain itu, krisis kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi dan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, memaksa BPOM untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Krisis seperti ini juga menuntut BPOM untuk meningkatkan komunikasi publiknya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan menginformasikan tentang langkah-langkah keamanan yang tepat. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu. Krisis kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan BPOM untuk beradaptasi dengan situasi darurat, menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola dalam strategi lembaga.

6. Akselerasi perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang akseleratif, khususnya dalam bidang bioteknologi dan nanoteknologi, menghadirkan sebuah paradigma baru dalam industri obat dan makanan yang secara fundamental dapat mengubah landscape pasar dan standar produk yang berlaku. Inovasi ini terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan di mana BPOM harus bereaksi untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi dan metodologi pengujian untuk menjaga standar keamanan tanpa menghambat inovasi.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di

kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Selain itu, kemampuan BPOM dalam memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru menjadi semakin kompleks, mengingat sifat inovatif dari produk yang mungkin memerlukan pendekatan pengawasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem regulasi yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan manfaat teknologi baru secara efektif dan efisien, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Isu lingkungan dan keberlanjutan

Isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi semakin strategis dalam dinamika pasar saat ini, mendorong tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perubahan ini menciptakan tantangan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menyesuaikan kerangka regulasi dan pengawasan untuk memenuhi ekspektasi baru tersebut. Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap isu lingkungan berdampak pada preferensi konsumsi, di mana konsumen kini lebih cenderung memilih produk yang tidak hanya aman dan efektif tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang minimal. Tantangan ini bukan hanya terletak pada penilaian keamanan dan kualitas produk dari perspektif kesehatan manusia, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi, distribusi, dan disposisi produk tersebut.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini meliputi potensi pergeseran cepat dalam standar industri yang dipengaruhi oleh kebutuhan keberlanjutan, serta tantangan dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses regulasi dan pengawasan yang ada. BPOM harus menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa regulasi tidak hanya mendukung inovasi dan keamanan produk tetapi juga memperhitungkan praktik berkelanjutan dan pengurangan dampak lingkungan. Selain itu, ada risiko reputasi jika BPOM dianggap tidak cukup responsif atau proaktif dalam mengatasi isu lingkungan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga. Meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan juga bisa memicu kebutuhan untuk pengawasan baru terhadap klaim lingkungan produk, menambah kompleksitas tugas BPOM dalam menjaga integritas pasar obat dan makanan. Tantangan ini menunjukkan perlunya BPOM untuk mengadaptasi pendekatan regulasi yang lebih holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek kesehatan tetapi juga pertimbangan lingkungan dalam evaluasi dan pengawasan produk. Meningkatnya kesadaran dan

tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengubah dinamika pasar dan memerlukan penyesuaian dalam regulasi dan pengawasan oleh BPOM.

Sebagai bagian dari upaya Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction yang bertujuan mengurangi pemborosan dan kerugian pangan secara global dan sejalan dengan standar internasional, BPOM mengembangkan kebijakan yang mendukung pengurangan food loss and food waste. Kebijakan yang disusun antara lain mengenai kemasan pangan. Kemasan pangan olahan harus dirancang sehingga selain mampu memberikan fungsi perlindungan, wadah, penanganan, dan komunikasi, juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial. Aspek ekologi yang penting adalah bagaimana kemasan pangan mampu mengurangi jumlah food loss and food waste.

8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menjadi ancaman serius bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam konteks pasar yang dinamis, kejadian kontaminasi, baik itu disengaja atau tidak, serta peredaran produk palsu, mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar obat dan makanan. Kepercayaan tersebut merupakan aset penting yang mempengaruhi efektivitas BPOM dalam menjalankan perannya sebagai pengawas obat dan makanan.

Ancaman dari kontaminasi dan falsifikasi ini semakin diperumit oleh kompleksitas rantai pasok global, di mana produk dan bahan baku melewati berbagai tahapan produksi dan distribusi. Ketidakjelasan dalam rantai pasok ini meningkatkan kesulitan dalam melacak sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu. Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan pelaku untuk memalsukan produk dengan cara yang semakin canggih, membuat deteksi oleh pihak pengawas menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menuntut vigilansi yang terus menerus dan pengawasan yang lebih ketat oleh BPOM untuk menjaga keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat.

9. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dinamika populasi, termasuk penambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara

signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, penuaan populasi (ageing population) dapat meningkatkan permintaan terhadap obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis, sedangkan perubahan pola penyakit, seperti meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung, memerlukan penyesuaian dalam pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran.

Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi BPOM dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif dari BPOM untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan BPOM tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

10. Ancaman bioterorisme

Ancaman bioterorisme, yang mencakup risiko penggunaan produk obat dan makanan sebagai medium untuk aksi bioterorisme, merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ancaman ini menggarisbawahi perlunya sistem pengawasan dan deteksi yang canggih dan efektif untuk mengidentifikasi serta mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan kesehatan masyarakat. Bioterrorisme dapat mengancam tidak hanya kesehatan individu melalui paparan terhadap agen patogenik, tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan dan ketidakpercayaan publik terhadap keamanan pasokan makanan dan obat-obatan.

Dalam menghadapi ancaman ini, BPOM dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat kerangka kerja regulasi dan pengawasan, termasuk pengembangan kemampuan laboratorium untuk pengujian patogen secara cepat dan akurat. Ancaman bioterorisme membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kerjasama internasional untuk pertukaran informasi dan praktek terbaik dalam deteksi dini dan respons terhadap ancaman.

Keterbatasan dalam teknologi deteksi dan sistem pemantauan yang ada dapat meningkatkan kerentanan terhadap aksi bioterorisme, menuntut peningkatan investasi

dalam teknologi pengawasan dan pengembangan protokol respons yang efektif. Tanpa pengawasan yang adekuat, risiko bioterorisme dapat mengancam integritas sistem kesehatan publik dan kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk obat dan makanan.

11. Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif

Dalam rangka penguatan tugas dan peran BPOM untuk melakukan tugas pengawasan obat dan makanan sampai pada level kabupaten/kota dibutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari Instansi Daerah, salah satunya dalam mendorong SDM yang memenuhi kualifikasi dan juga bertugas dalam rumpun kesehatan maupun pengawasan obat dan makanan untuk menjadi jabatan Pengawasan Farmasi dan Makanan (PFM). Saat ini PFM

Inklusif di seluruh Indonesia berjumlah 35 orang. Terbatasnya jumlah PFM inklusif tersebut belum memenuhi kebutuhan kolaborasi pengawasan obat dan makanan. Hal ini dihadapkan pada dinamisnya pola rotasi dan mutasi jabatan fungsional di Instansi Daerah sehingga SDM yang sudah ditugaskan sebagai PFM tidak dapat secara maksimal menjalankan tugasnya karena diberikan penugasan dengan yang tidak terkait dengan fungsi terkait pengawasan obat dan makanan. Penguatan dalam pengelolaan PFM dibutuhkan komitmen dari instansi dimana PFM Inklusif bertugas, selain itu dibutuhkan kolaborasi dengan lintas sektor pada level pusat seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membuat kebijakan baru untuk penambahan formasi bagi Jabatan Fungsional PFM Inklusif di instansi daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 merupakan periode awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 - 2045, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai UPT BPOM, Balai POM Tasikmalaya melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Tasikmalaya berkontribusi terhadap kesehatan publik melalui pengawasan produk obat dan makanan khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

A. Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, Balai POM di Tasikmalaya telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan Balai POM di Tasikmalaya dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, Balai POM di Tasikmalaya berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai POM di Tasikmalaya dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Balai POM di Tasikmalaya untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan

menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi Balai POM di Tasikmalaya untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Balai POM di Tasikmalaya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Balai POM di Tasikmalaya telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi Balai POM di Tasikmalaya disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu **“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,**

kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi Balai POM di Tasikmalaya untuk mencapai visi Balai POM di Tasikmalaya tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

C. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Balai POM di Tasikmalaya, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Balai POM di Tasikmalaya telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran strategis Balai POM di Tasikmalaya 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

- 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya:** Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Balai POM di Tasikmalaya dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki

infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi:

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk melakukan pengawasan untuk mengukur sejauh mana ketercakupannya pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah

kerja Balai POM di Tasikmalaya: Sasaran kegiatan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, Balai POM di Tasikmalaya berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di

Tasikmalaya: Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, Balai POM di Tasikmalaya berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan

dan mutu: Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

6. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya:** Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan Balai POM di Tasikmalaya dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor obat dan makanan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.
7. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya:** Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya BPOM.
8. **Layanan Publik UPT yang Prima:** Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.
9. **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal:** Sasaran ini ditujukan untuk membangun Balai POM di Tasikmalaya sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Setiap sasaran strategis ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Balai POM di Tasikmalaya dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Berikut adalah sasaran kegiatan dan indikator Balai POM di Tasikmalaya tahun 2025 yang terdapat pada tabel 1.

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Tasikmalaya 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	IKSK 1.1	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		IKSK 1.2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM
		IKSK 1.3	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		IKSK 1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
		IKSK 1.5	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		IKSK 1.6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu
		IKSK 1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK 2.1	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	IKSK 3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL
SK 4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	IKSK 4.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan	IKSK 5.1	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan

	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya		oleh UPT
SK 6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	IKSK 6.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
		IKSK 6.2	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman
		IKSK 6.3	Jumlah desa pangan aman
		IKSK 6.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK 7.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 8	Layanan Publik UPT yang prima	IKSK 8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK 9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
		IKSK 9.2	Nilai AKIP UPT BPOM
		IKSK 9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
		IKSK 9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Rencana Strategis (Renstra) dengan penyusunan anggaran, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025. Rencana Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3. Rencana Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2.	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	5
		Jumlah desa pangan aman	1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		Nilai AKIP UPT BPOM	75
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	87
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

2.3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025

Berdasarkan Rencana Strategis Balai POM di Tasikmalaya 2025-2029, maka disusunlah perjanjian kinerja Balai POM di Tasikmalaya pada Tahun 2025. Terdapat perbedaan antara perjanjian kinerja 2025 dengan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025, hal ini dikarenakan RKT tahun 2025 dibuat sebelum rencana strategis tahun 2025-2029 untuk pemenuhan penyusunan anggaran tahun 2025. Data perjanjian kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,63
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,13
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET

7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	76
		Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	78,5
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Tasikmalaya 2025-2029, maka disusunlah rencana aksi perjanjian Kinerja Balai POM di Kota Tasikmalaya pada Tahun 20235 Data rencana aksi perjanjian kinerja dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2025

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	119.265.000
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	49.600.000
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	23.755.000
4	Persentase sampel KLB keracunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	22.000.000

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
	pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT													
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	23.755.000
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	5	10	25	35	40	45	50	55	60	65	75	82	20.994.000
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	42.134.000
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	42.134.000
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	156.778.500

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	156.778.500
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	24.145.000
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						20	20	20	60	60	60	60	4.066.000
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			7	7	7	10	10	10	12	12	12	14	1.754.357.000
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	118.867.000
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				70	70	70	95	100	100	100	100	4	150.771.000
16	Jumlah desa pangan aman				50	70	80	100	100	100	100	100	1	127.155.000
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				25	50	70	100	100	100	100	100	1	63.750.000
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	2	9	12	42	52	62	72	75	85	85	85	91	32.635.000

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
	rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan													
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	10	20	40	40	50	55	65	70	75	80	83	218.804.000
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	52.835.000
21	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.4	68.734.000
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												76	44.444.000
23	Nilai AKIP UPT BPOM												78.5	17.418.000
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	33.027.071.000
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.85	67.884.000

2.5. Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Kota Tasikmalaya merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN DALAM %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

				
Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
$X > 110\%$	$100\% \leq X \leq 110\%$	$90\% < X \leq 100\%$	$60\% \leq X \leq 90\%$	$< 60\%$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Balai POM di Tasikmalaya tahun 2025 yang memuat 9 (Sembilan) sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU). Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Target, Realisasi dan Persentase Capaian dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)	Konversi	Kriteria Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	100	121,21	110	Sangat Baik
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100,00	133,33	110	Sangat Baik
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	-
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90	105,88	105,88	Sangat Baik
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	25	40,00	160,00	110,00	Sangat Baik
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	100	107,53	107,53	Sangat Baik
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	110	Sangat Baik

		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,63	100	110,34	110	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	110	Sangat Baik
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,13	100	123,26	110	Sangat Baik
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7	7,2	102,86	102,86	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	84,91	98,69	98,69	Cukup
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	-	-	-
		16	Jumlah desa pangan aman	-	-	-	-	-
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12	11,67	97,25	97,25	Cukup
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	28,33	141,65	110	Sangat Baik

7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100	Baik
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	-	-	-	-	-
		23	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	-	-	-	-	-
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	-	-	-	-	-
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-
Total Capaian PK							1272,21	-
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)							106,02	Sangat Baik

Hasil pencapaian kinerja Balai POM di Tasikmalaya pada triwulan I Tahun 2025, dari 9 sasaran kegiatan terdapat sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan kriteria baik yaitu **“Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”**, **“Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”** dan **“Meningkatnya efektivitas KIE di masingmasing wilayah kerja UPT”** sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan kriteria sangat baik yaitu **“Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”**, **“Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”**, dan **“Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah**

kerja UPT". Sementara itu, 3 (tiga) sasaran lainnya belum dilakukan pengukuran pada periode ini.

3.1.1. Sasaran Kegiatan Ke-1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 11 (sebelas) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **109,27** dengan kriteria **Sangat Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Triwulan II Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	100	121,21	Tidak Dapat Disimpulkan	
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100,00	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	-
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90	105,88	Sangat Baik	
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	25	40,00	160,00	Tidak Dapat Disimpulkan	
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi	93	100	107,53	Sangat Baik	

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan	
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,63	100	110,34	Tidak Dapat Disimpulkan	
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan	
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,13	100	123,26	Tidak Dapat Disimpulkan	
Nilai Pencapaian Sasaran			109,27	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

3.1.1.1. Persentase sampel sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi meliputi obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk

keadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kaedaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	100	121,21	Tidak Dapat Disimpulkan	

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 82,5% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan I maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 121,21% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Capaian realisasi triwulan I belum dapat dilakukan perbandingan karena merupakan triwulan pertama pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan, sehingga belum tersedia data pembandingan dari periode sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 82,5%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 121,21% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi triwulan III tahun 2024 terhadap target tahunan “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	100	121,21	Tercapai	

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada awal tahun 2025, terdapat pemblokiran anggaran sehingga terdapat penyesuaian pelaksanaan sampling pada triwulan I.
- Pelaksanaan sampling oleh Balai POM di Tasikmalaya telah dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan sampling dibuat menyesuaikan dengan kemampuan balai pengujian yaitu Balai Besar POM di Bandung, karena laboratorium Balai POM di Tasikmalaya hanya mampu melakukan pengujian obat untuk beberapa zat aktif dengan rapid test.
- Pada triwulan I, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan sampling terhadap 6 sampel sediaan farmasi dari total target dalam 1 tahun sejumlah 250 sampel (2,4%); dengan rincian 3 sampel obat bahan alam dan 3 sampel kosmetik.
- Berdasarkan hasil evaluasi penandaan dan pengujian terhadap sampel sediaan farmasi yang berisiko, terdapat 6 sampel yang telah selesai uji dengan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling dan dilaporkan sesuai dengan timeline. Keenam sampel sediaan farmasi tersebut adalah 3 sampel Obat Bahan Alam dan 3 sampel Kosmetik. Berdasarkan renlak triwulan 1, sampel Obat, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan belum dilakukan sampling.

- Sejumlah 1 sampel obat bahan alam dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengandung Metil Salisilat dan 2 sampel dinyatakan tidak memenuhi ketentuan penandaan, sehingga ketiga sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat. Obat Bahan Alam yang mengandung Bahan Kimia Obat tersebut merupakan sampel kasus yang perlu dilakukan sampling dan pengujian. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dilihat bahwa produsen Obat Bahan Alam tersebut tidak menjalankan Cara Produksi Obat Bahan Alam yang Baik sehingga produk akhir yang dihasilkan tidak sesuai dengan ketentuan. Produsen dari Obat Bahan Alam yang tidak memenuhi syarat tersebut berada di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya. Terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT. Balai POM telah melaksanakan pembinaan terhadap sarana yang memproduksi Obat Bahan Alam yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat tersebut untuk dapat melaksanakan penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara konsisten.
- Seluruh sampel kosmetik yang disampling di triwulan I telah memenuhi syarat pengujian dan penandaan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring rekomendasi dari pusat terkait penarikan obat dan pembinaan terhadap sarana yang memproduksi obat bahan alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian sebelumnya.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring kesesuaian rencana pelaksanaan sampling.
- Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi penarikan produk dari pusat.
- Meningkatkan komunikasi ke balai penguji agar sampel Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat dilakukan pengujian sesuai pedoman sampling dan selesai dilaporkan tepat waktu sesuai timeline melalui SIPT.
- Seluruh produk tersampling telah dilaporkan melalui SIPT termasuk hasil pengawasan penandaan/label, sehingga data tersebut dapat digunakan Badan POM dalam melakukan tindak lanjut ke pelaku usaha..

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada awal tahun 2025, seluruh petugas sampling Balai POM di Tasikmalaya telah mengikuti e-learning terkait pelaksanaan sampling tahun 2025 untuk seluruh komoditi, sehingga membantu petugas dalam memahami mekanisme sampling tahun 2025 dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan sampling.
- Balai POM di Tasikmalaya telah menindaklanjuti rekomendasi dari pusat terkait penarikan produk tidak memenuhi syarat, dengan melaksanakan pemantauan penarikan produk TMS dan melaporkannya ke Badan POM pusat.
- Adanya monitoring dan evaluasi sampling yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara berkala yang membahas terkait evaluasi sampling dan pengujian yang dilakukan oleh UPT sehingga UPT dapat memperbaiki ketidaksesuaian dari hasil evaluasi.
- Laporan terhadap sampel TMS dan TMK penandaan telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT.

3.1.1.2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dihitung dengan cara persentase pembagian dari jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh Balai POM di Tasikmalaya pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11. Penilaian persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO belum dilakukan pada triwulan ini dan akan dilakukan pada akhir triwulan IV.

3.1.1.3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ketentuan pedoman tindak lanjut pengawasan diantaranya adalah : (1) Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian; (2) Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi; (3) Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS; (4) Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS; (5) Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta 51paya lain untuk memastikan produk tidak beredar. Parameter perhitungan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilakukan dengan memperhatikan 6 aspek diantaranya yaitu kesesuaian target sampel UPT; kesesuaian parameter uji; ketepatan pengambilan Kesimpulan; ketepatan waktu pengambilan sampel; ketepatan pelaporan sampling dan pengujian; dan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 75% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan I maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 133,33% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Capaian realisasi triwulan I belum dapat dilakukan perbandingan karena merupakan triwulan pertama pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan, sehingga belum tersedia data pembandingan dari periode sebelumnya.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 75%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 133,33% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada awal tahun 2025, terdapat pemblokiran anggaran sehingga terdapat penyesuaian pelaksanaan sampling pada triwulan I.
- Pelaksanaan sampling oleh Balai POM di Tasikmalaya telah dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan sampling dibuat menyesuaikan dengan kemampuan balai penguji yaitu Balai Besar POM di

Bandung, karena laboratorium Balai POM di Tasikmalaya hanya mampu melakukan pengujian obat untuk beberapa zat aktif dengan rapid test.

- Pada triwulan I, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan sampling terhadap 6 sampel produk pangan olahan dari total target dalam 1 tahun sejumlah 125 sampel (4,8%).
- Berdasarkan hasil evaluasi penandaan dan pengujian terhadap sampel Pangan Olahan, terdapat 6 sampel yang telah selesai uji dengan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling dan dilaporkan sesuai dengan timeline. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dilihat bahwa produsen Pangan Olahan telah menjalankan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sehingga produk akhir yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan. Semua laporan hasil pemeriksaan dan pengujian produk telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT. Keenam sampel tersebut mengalami kendala dalam pengujian logam berat dikarenakan alat ICPMS dari Balai POM di Bandung mengalami kerusakan pada tanggal 10 Februari sampai dengan 20 Maret 2025. Oleh karena itu, perhitungan timeline pengujian pada sampel terhenti/*clock off* sampai alat tersebut diperbaiki dan dapat digunakan kembali. Pada tanggal 21 Maret 2025 sampel Pangan Olahan tersebut dapat dilakukan pengujian logam berat sehingga perhitungan timeline dimulai kembali/*clock on*. Perhitungan timeline pengujian dari Pangan Olahan masih sesuai dengan ketentuan yaitu 20HK/sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring rekomendasi dari pusat terkait penarikan produk pangan olahan.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring kesesuaian rencana pelaksanaan sampling.
- Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi penarikan produk dari pusat.
- Meningkatkan komunikasi ke balai penguji agar sampel dapat dilakukan pengujian sesuai pedoman sampling dan selesai dilaporkan tepat waktu sesuai timeline melalui SIPT.
- Seluruh produk tersampling telah dilaporkan melalui SIPT termasuk hasil pengawasan penandaan/label, sehingga data tersebut dapat digunakan Badan POM dalam melakukan tindak lanjut ke pelaku usaha.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada awal tahun 2025, seluruh petugas sampling Balai POM di Tasikmalaya telah mengikuti e-learning terkait pelaksanaan sampling tahun 2025 untuk seluruh komoditi, sehingga membantu petugas dalam memahami mekanisme sampling tahun 2025 dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan sampling.
- Balai POM di Tasikmalaya telah menindaklanjuti rekomendasi dari pusat terkait penarikan produk tidak memenuhi syarat, dengan melaksanakan pemantauan penarikan produk TMS dan melaporkannya ke Badan POM pusat.
- Laporan terhadap sampel TMS dan TMK penandaan telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT.

3.1.1.4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

Parameter perhitungan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar terdiri dari beberapa aspek diantaranya adalah jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi; umlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling; dan Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi .

Pada Triwulan I Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar tidak dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan nota dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 terkait Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

3.1.1.5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. sesuai pedoman sampling yang dimaksud adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Perhitungan dari realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan cara memperhatikan beberapa aspek diantaranya adalah Kesesuaian target sampel PIRT; Kesesuaian Parameter Uji; Ketepatan Pengambilan Kesimpulan; Ketepatan waktu pengambilan sampel; Ketepatan waktu pelaporan; dan Tindak lanjut Sampel PIRT. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90	105,88	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 85% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 90% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan I maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 105,88% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Capaian realisasi triwulan I belum dapat dilakukan perbandingan karena merupakan triwulan pertama pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan, sehingga belum tersedia data pembanding dari periode sebelumnya.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 90%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 105,88% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90	105,88	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada awal tahun 2025, terdapat pemblokiran anggaran sehingga terdapat penyesuaian pelaksanaan sampling pada triwulan I.
- Pelaksanaan sampling oleh Balai POM di Tasikmalaya telah dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan sampling dibuat menyesuaikan dengan kemampuan balai penguji yaitu Balai Besar POM di Bandung, karena laboratorium Balai POM di Tasikmalaya hanya mampu melakukan pengujian obat untuk beberapa zat aktif dengan rapid test.
- Pada triwulan I, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan sampling terhadap 5 sampel PIRT dari total target dalam 1 tahun sejumlah 10 sampel (50%).
- Berdasarkan hasil evaluasi penandaan dan pengujian, total 4 sampel PIRT berisiko telah selesai uji dengan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling dan dilaporkan sesuai dengan timeline. Dari 4 sampel PIRT tersebut terdapat 2 sampel tidak memenuhi syarat, yaitu 1 sampel mengandung cemaran logam Arsen (As) melebihi persyaratan; 1 sampel

tidak memenuhi syarat kimia dan mikrobiologi yaitu rasio Bahan Tambahan Pangan berupa pewarna yang melebihi persyaratan dan mengandung *Bacillus cereus*. Terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut merupakan sampel PIRT yang berasal dari wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya. Tindak lanjut terhadap sampel tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dilakukan pada bulan April 2025, yaitu berupa memberikan surat rekomendasi kepada Dinas Kesehatan terkait untuk dapat dilakukan pembinaan.

- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan monitoring rekomendasi tindak lanjut PIRT yang tidak memenuhi syarat dari pusat dan UPT Badan POM lain. Pada triwulan I, Balai POM di Tasikmalaya belum mendapatkan rekomendasi.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring kesesuaian rencana pelaksanaan sampling.
- Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi terkait produk PIRT tidak memenuhi syarat dari pusat maupun UPT BPOM lain.
- Meningkatkan komunikasi dengan UPT lain terkait rekomendasi PIRT yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Meningkatkan komunikasi dengan Dinas Kesehatan setempat terkait rekomendasi pembinaan terhadap produk yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Meningkatkan komunikasi ke balai penguji agar sampel dapat dilakukan pengujian sesuai pedoman sampling dan selesai dilaporkan tepat waktu sesuai timeline melalui SIPT.
- Seluruh produk tersampling telah dilaporkan melalui SIPT termasuk hasil pengawasan penandaan/label, sehingga data tersebut dapat digunakan Badan POM dalam melakukan tindak lanjut ke pelaku usaha.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada awal tahun 2025, seluruh petugas sampling Balai POM di Tasikmalaya telah mengikuti e-learning terkait pelaksanaan sampling tahun 2025 untuk seluruh komoditi, sehingga membantu petugas dalam memahami mekanisme

sampling tahun 2025 dan meminimalisir kendala dalam pelaksanaan sampling.

- Terhadap sampel PIRT yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan, akan ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi pembinaan kepada Dinas Kesehatan setempat pada bulan April 2025, karena hasil pengujian PIRT baru diketahui pada akhir bulan Maret 2025.
- Laporan terhadap sampel TMS dan TMK penandaan telah dilaporkan ke Badan POM melalui SIPT.

3.1.1.6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dapat dihitung dengan memperhatikan 2 aspek yaitu jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha atau jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha dan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor atau jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Capaian Kinerja Indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” Triwulan I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	25	40	160	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 25% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan I tahun 2025 sebesar 40% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan I maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 160% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Capaian realisasi triwulan I belum dapat dilakukan perbandingan karena merupakan triwulan pertama pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan, sehingga belum tersedia data pembanding dari periode sebelumnya.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 82%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 40%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 48,78% dengan kriteria perlu Upaya keras. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82	40	48,78	Perlu Upaya Keras	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dihitung dari persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.
- Pada triwulan I, Balai POM di Tasikmalaya telah mengeluarkan sejumlah 35 rekomendasi kepada pelaku usaha dengan rincian : 4 rekomendasi terkait komoditi obat; 5 rekomendasi terkait komoditi obat bahan alam; 5 rekomendasi terkait komoditi kosmetik; dan 21 rekomendasi terkait komoditi pangan. Total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sejumlah 14 rekomendasi dengan rincian : 2 rekomendasi terkait komoditi obat tradisional; 3 rekomendasi terkait komoditi kosmetik; dan 9 rekomendasi terkait komoditi pangan.
- Pada triwulan I, terdapat pemblokiran anggaran sehingga rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai POM di Tasikmalaya lebih sedikit dari yang diprediksi karena terdapat penyesuaian jumlah sarana yang diperiksa di triwulan I.
- Sebagian besar rekomendasi baru dikeluarkan pada bulan Maret 2025 sehingga sarana masih dalam timeline perbaikan untuk pelaporan CAPA.
- Pada triwulan I, Balai POM di Tasikmalaya belum mengeluarkan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan kepada lintas sektor, sehingga belum ada capaian pada persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh

pelaku usaha dan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan monitoring dan follow up CAPA hasil pemeriksaan terhadap pelaku usaha baik secara formal melalui surat penagihan CAPA maupun informal melalui komunikasi melalui Whatsapp.
- Menyelenggarakan Desk CAPA terhadap sarana yang belum melakukan pelaporan CAPA.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan monitoring dan follow up CAPA terhadap pelaku usaha baik secara formal melalui surat maupun informal dengan komunikasi melalui WhatsApp.
- Balai POM di Tasikmalaya belum mengeluarkan rekomendasi kepada lintas sektor pada triwulan I. Rekomendasi kepada lintas sektor akan diberikan pada triwulan II terkait hasil sampling PIRT yang tidak memenuhi syarat.

3.1.1.7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi: (1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit; (2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen Kesehatan; dan (3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Perhitungan indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilakukan dengan cara persentase rata-rata dari Sarprod Obat, persentase Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan,

persentase Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	100	107,53	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 93% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan I maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 107,53% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Capaian realisasi triwulan I belum dapat dilakukan perbandingan karena merupakan triwulan pertama pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan, sehingga belum tersedia data pembandingan dari periode sebelumnya.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 93%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 107,53% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	100	107,53	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada triwulan I, Balai POM di Tasikmalaya melakukan pemeriksaan terhadap 3 sarana produksi sediaan farmasi dari total target dalam 1 tahun sejumlah 4 sarana (75%) dengan rincian : 1 industri kosmetik; 1 Usaha Kecil Obat Tradisional; dan 1 Usaha Mikro Obat Tradisional.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, industri kosmetik dinyatakan memenuhi ketentuan dengan sanksi peringatan; Usaha Kecil Obat Tradisional dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dengan sanksi pembinaan; dan Usaha Mikro Obat Tradisional dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dengan sanksi peringatan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pembinaan kepada sarana pada saat pemeriksaan rutin. Terhadap temuan dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tasikmalaya, sarana diminta melakukan perbaikan dan melaporkan CAPA. Saat ini, ketiga sarana sedang dalam proses CAPA.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh Balai POM di Tasikmalaya sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah dilaporkan ke pusat melalui SIPT sesuai timeline.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi agar dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- Refreshment pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai pedoman.
- Monitoring kesesuaian tindak lanjut dari hasil evaluasi pusat.

- Monitoring ketepatan waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Monitoring ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring kesesuaian pencapaian target pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melakukan monitoring terkait ketepatan waktu tindak lanjut dan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT.
- Adanya monitoring dan evaluasi pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan secara berkala yang membahas terkait evaluasi hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh UPT sehingga UPT dapat memperbaiki ketidaksesuaian dari hasil evaluasi.

3.1.1.8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi: (1) Ketepatan waktu tindak lanjut dan (2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan . Pada Triwulan I Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan nota dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor PR.04.02.21.04.25.124

tanggal 28 April 2025 terkait Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 80% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan I maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 125% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Capaian realisasi triwulan I belum dapat dilakukan perbandingan karena merupakan triwulan pertama pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan, sehingga belum tersedia data pembandingan dari periode sebelumnya.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 80%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 125% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada triwulan I terdapat pemblokiran anggaran, sehingga terdapat penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.
- Pada triwulan I, Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 sarana produksi pangan olahan dari total target dalam 1 tahun sejumlah 34 sarana (5,88%).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh industri pangan yang diperiksa dinyatakan tidak memenuhi ketentuan karena belum sepenuhnya menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik secara konsisten. Terhadap sarana telah diberikan sanksi berupa Peringatan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pembinaan kepada sarana pada saat pemeriksaan rutin. Terhadap temuan dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tasikmalaya, sarana diminta melakukan perbaikan dan melaporkan CAPA. Saat ini, dua sarana tersebut sedang dalam proses CAPA.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh Balai POM di Tasikmalaya sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah dilaporkan ke pusat melalui SIPT sesuai timeline.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan agar dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

- Refreshment pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi pangan olahan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai pedoman.
- Monitoring kesesuaian tindak lanjut dari hasil evaluasi pusat.
- Monitoring ketepatan waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Monitoring ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan beserta target pemeriksaan seiring dengan pemblokiran anggaran.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring kesesuaian pencapaian target pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring ketepatan waktu tindak lanjut serta pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT.

3.1.1.9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi: (1) Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian; (2) Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; dan (4) Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Perhitungan indikator persentase

sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan beberapa aspek diantaranya adalah Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan; Kesesuaian Tindaklanjuti; dan Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjuti.

Pada Triwulan I Indikator Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan nota dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 terkait Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Capaian Kinerja Indikator “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,63	100	110,34	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 90,63% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan I maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 110,34% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Capaian realisasi triwulan I belum dapat dilakukan perbandingan karena merupakan triwulan pertama pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan, sehingga belum tersedia data pembandingan dari periode sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 90,63%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 110,34% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,63	100	110,34	Tercapai	

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada triwulan I terdapat pemblokiran anggaran, sehingga terdapat penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi.
- Pada triwulan I, Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 sarana distribusi sediaan farmasi dari total target dalam 1 tahun sejumlah 260 sarana (7,31%); dengan rincian : 1 rumah sakit; 1 klinik; 2 apotek; 3 distribusi obat tradisional; 1 badan usaha pemilik notifikasi kosmetik; dan 11 sarana distribusi kosmetik.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, 1 rumah sakit dinyatakan memenuhi ketentuan dan diberikan sanksi berupa peringatan; 1 klinik dinyatakan memenuhi ketentuan dan diberikan sanksi berupa peringatan; 2 apotek dinyatakan tidak memenuhi ketentuan : 1 apotek diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan dan 1 apotek diberikan sanksi peringatan keras; 3 sarana distribusi obat tradisional dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dan diberikan sanksi peringatan; 1 badan usaha pemilik notifikasi dinyatakan memenuhi ketentuan, pemberian tindak lanjut dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik; 8 sarana distribusi kosmetik dinyatakan memenuhi ketentuan dan diberikan tindak lanjut berupa pembinaan teknis; dan

3 sarana distribusi kosmetik dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dan diberikan sanksi berupa peringatan.

- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pembinaan kepada sarana pada saat pemeriksaan rutin. Terhadap temuan dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tasikmalaya, sarana diminta melakukan perbaikan dan melaporkan CAPA.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh Balai POM di Tasikmalaya sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah dilaporkan ke pusat melalui SIPT sesuai timeline.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi agar dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- Refreshment pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai pedoman.
- Monitoring kesesuaian tindak lanjut dari hasil evaluasi pusat.
- Monitoring ketepatan waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Monitoring ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi beserta target pemeriksaan seiring dengan pemblokiran anggaran.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring kesesuaian pencapaian target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi.
- Pelaksanaan intensifikasi pengawasan kosmetik pada bulan Februari 2025 sesuai surat edaran dari Kedeputian II dengan menargetkan badan usaha penotifikasi kosmetik dan sarana distribusi kosmetik.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring ketepatan waktu tindak lanjut serta pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT.

3.1.1.10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Tahapan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan adalah dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Perhitungan realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan adalah dengan cara Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan di kali 100. Dan jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan yang dimaksud adalah Jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Capaian Kinerja Indikator “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 85% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan I maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 117,65% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Capaian realisasi triwulan I belum dapat dilakukan perbandingan karena merupakan triwulan pertama pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan, sehingga belum tersedia data pembandingan dari periode sebelumnya.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 117,65% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada triwulan I terdapat pemblokiran anggaran, sehingga terdapat penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan.
- Pada triwulan I, Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 sarana distribusi sediaan farmasi dari total target dalam 1 tahun sejumlah 111 sarana (16,22%).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, 18 sarana distribusi pangan olahan dinyatakan memenuhi ketentuan dengan rincian : 3 sarana diberikan sanksi peringatan keras karena ditemukan produk tanpa izin edar; 3 sarana diberikan sanksi peringatan karena ditemukan produk kedaluwarsa dan/atau produk rusak; dan 12 sarana diberikan tindak lanjut berupa pembinaan teknis.
- Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan pembinaan kepada sarana pada saat pemeriksaan rutin. Terhadap temuan dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tasikmalaya, sarana diminta melakukan perbaikan dan melaporkan CAPA.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh Balai POM di Tasikmalaya sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- Seluruh hasil pemeriksaan telah dilaporkan ke pusat melalui SIPT sesuai timeline.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan agar dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- Refreshment pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai pedoman.
- Monitoring kesesuaian tindak lanjut dari hasil evaluasi pusat.
- Monitoring ketepatan waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Monitoring ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan beserta target pemeriksaan seiring dengan pemblokiran anggaran.
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring kesesuaian pencapaian target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan.
- Pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan pada bulan ramadhan sesuai surat edaran dari Kedeputian III dengan menargetkan distributor dan retail pangan..
- Balai POM di Tasikmalaya telah secara intensif melaksanakan monitoring ketepatan waktu tindak lanjut serta pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT.

3.1.1.11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Sediaan Farmasi dapat berupa Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan

Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Tahapan pelaksanaan pengawasan iklan diantaranya adalah dimulai dengan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Perhitungan realisasi indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah dengan memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut diantaranya Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan; Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan; Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan; Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan; dan Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Capaian Kinerja Indikator “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” Triwulan I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,13	100	123,26	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 81,13% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan I maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 123,26% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Capaian realisasi triwulan I belum dapat dilakukan perbandingan karena merupakan triwulan pertama pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan, sehingga belum tersedia data pembandingan dari periode sebelumnya.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 81,13%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 123,26% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,13	100	123,26	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada triwulan I, Balai POM di Tasikmalaya telah melaksanakan pengawasan iklan terhadap 107 sediaan farmasi dan pangan olahan dari total target dalam 1 tahun sejumlah 607 iklan (17,63%) dengan rincian : 16 iklan obat; 13 iklan obat bahan alam; 7 iklan suplemen kesehatan; 50 iklan kosmetik; dan 21 iklan pangan olahan.
- Seluruh iklan telah diawasi dan dilaporkan secara tepat waktu melalui SIPT. Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:
 - Meningkatkan monitoring ketepatan pelaksanaan pengawasan iklan sesuai rencana pelaksanaan.
 - Melaksanakan monitoring ketepatan waktu pelaporan pengawasan iklan melalui SIPT.
 - Melaksanakan monitoring kesesuaian hasil pengawasan iklan sesuai pedoman.
 - Refreshment pedoman pengawasan iklan untuk meningkatkan kompetensi petugas pengawas iklan dalam menyimpulkan hasil pengawasan iklan.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Balai POM di Tasikmalaya telah secara berkala melaksanakan monitoring capaian pengawasan iklan beserta ketepatan waktu pengawasan iklan.
- Adanya monitoring oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terkait hasil evaluasi pengawasan iklan oleh UPT sehingga UPT dapat memperbaiki ketidaksesuaian dari hasil evaluasi.
- Monitoring kesesuaian hasil pengawasan melalui tarikan data SIPT.
- Pada fungsi pemeriksaan, telah dilakukan pembagian tugas dalam pengawasan iklan masing - masing komoditi, sehingga 1 orang petugas dapat fokus mengawasi komoditi iklan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga monitoring dapat lebih mudah serta kompetensi petugas dapat lebih terspesialisasi.

3.1.2. Sasaran Kegiatan Ke-2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yaitu: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi. Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk melakukan pengawasan untuk mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan

fortifikasi (jika diperlukan). Perhitungan realisasi indikator persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah dengan cara Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT dikalikan 100%.

3.1.3. Sasaran Kegiatan Ke – 3

Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yaitu: Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar kemampuan Laboratorium Balai POM di Tasikmalaya merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2 dan 1 terdiri dari beberapa komponen yaitu (1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup; (2) Standar Peralatan; dan (3) Standar Kompetensi Laboratorium. Cara Perhitungan nilai standar kemampuan Laboratorium dihitung sesuai dengan tingkatan Dimana Tingkat 2 terdiri dari beberapa aspek perhitungan diantaranya : (1) Nilai pemenuhan SRL Balai POM; (2) Nilai pemenuhan standar peralatan Balai POM; (3) nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM; (4) Nilai Pemenuhan standar kemampuan Laboratorium Tingkat 1.

Tabel 27. Capaian Kinerja Indikator “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” Triwulan I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7	7,2	102,86	Sangat Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 7 sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai

Standar Kemampuan Laboratorium triwulan I tahun 2025 sebesar 7,2 dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan I maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 102,86% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Capaian realisasi triwulan I belum dapat dilakukan perbandingan karena merupakan triwulan pertama pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan, sehingga belum tersedia data pembanding dari periode sebelumnya.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 14. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 7,2%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 51,43% dengan kriteria tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	7,2	51,43	Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada triwulan I telah melakukan perkiraan nilai dengan menggunakan tools penilaian SKL 2025 pada setiap triwulan hingga akhir tahun. Pemenuhan SKL terdiri dari Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup, Persentase Pemenuhan Peralatan dan Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium. Pemenuhan Persentase Standar Ruang Lingkup pengujian yaitu dengan melakukan verifikasi pada metode pengujian komoditi obat, yaitu pengujian rapid test obat. Rapid Test yang dilakukan oleh Balai POM di Tasikmalaya sebanyak 7 metode analisis yang telah dilakukan verifikasi. Pemilihan Metode Analisis yang dilakukan verifikasi berdasarkan ketersediaan reagen

yang ada di Laboratorium BPOM Tasikmalaya. Balai POM di Tasikmalaya belum melakukan pengujian kimia pada sediaan kosmetik, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi karena keterbatasan alat dan reagen serta keterbatasan kompetensi penguji dalam melakukan verifikasi metode uji mikrobiologi.

- Pada pemenuhan komponen SKL Persentase pemenuhan peralatan terdapat perubahan cara penilaian dibandingkan dengan penilaian SKL pada tahun 2024, yaitu penilaian berdasarkan alat utama baik pada laboratorium kimia maupun mikrobiologi. Penilaian yang dilakukan pada tahun 2025 pada TW 1 merupakan alat yang pengadaannya dilakukan pada tahun 2024 menjadi baseline pada pemenuhan persentase pemenuhan peralatan, yaitu 2 Alat Kimia yaitu Timbangan Analitik dan Spektrofotometer dan 22 alat Mikrobiologi.
- Pada pemenuhan komponen SKL Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium mendapatkan poin 20 yang berasal dari Aspek 2 pada komoditi Obat. Kompetensi Obat mendapatkan nilai aspek 2 karena seluruh metode analisis yang sudah diverifikasi terdapat 2 orang yang telah kompeten melakukan pengujian/verifikasi pada seluruh metode analisis yang diajukan pada Pemenuhan Standar Ruang Lingkup. Data dukung berupa Laporan Verifikasi yang telah dilakukan oleh personel. Balai POM di Tasikmalaya belum melakukan pengujian kimia pada sediaan kosmetik, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi karena keterbatasan alat dan reagen serta keterbatasan kompetensi penguji dalam melakukan verifikasi metode uji mikrobiologi.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan pengadaan rapid test kit dan reagen yang dibutuhkan untuk mendukung dalam meningkatkan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dan Pemenuhan Kompetensi Laboratorium.
- Melakukan pengadaan alat yang telah mendapatkan rekomendasi dari PPPOMN sehingga dapat meningkatkan pemenuhan peralatan dan dapat mendukung peningkatan standar ruang lingkup dan kompetensi personel laboratorium

- Mengikuti pelatihan secara luring untuk lebih meningkatkan kompetensi personel pengujian secara praktik, baik pelatihan yang dilakukan mandiri, dari PPPOMN maupun UPT lain di Badan POM.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada akhir TW 1 telah dilakukan pengadaan beberapa rapid test kit pangan, reagen dan media dimana dapat memperbanyak metode analisis yang dapat dilakukan pengujian dan verifikasi sehingga mampu meningkatkan nilai pemenuhan ruang lingkup pengujian dan kompetensi personel.
- Personel Pengujian telah mengikuti Pelatihan Verifikasi metode Kualitatif dan Kuantitatif Mikrobiologi secara daring yang diadakan oleh PPPOMN pada 13-14 Maret 2025 sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dalam melakukan verifikasi metode mikrobiologi.

3.1.4. Sasaran Kegiatan Ke-4

Meningkatnya efektivitas KIE di masingmasing wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan ke empat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 98,69% dengan kriteria Baik. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Triwulan II Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	84,91	98,69	Baik	
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	-	-	-	-
3. Jumlah desa pangan aman	0	-	-	-	-
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	-	-	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran			98,69	Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kedua, sebagai berikut:

3.1.4.1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu : (1) Sumber atau Narasumber KIE; (2) Konten atau Informasi KIE; (3) Pemahaman Audiens KIE; dan (4) Manfaat KIE bagi Audiens KIE. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Capaian Kinerja Indikator “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” yang dilaksanakan triwulan I tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	84,91	98,69	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 86,04% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT triwulan I tahun 2025 sebesar 84,91% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan I maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 98,69% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Capaian realisasi triwulan I belum dapat dilakukan perbandingan karena merupakan triwulan pertama pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan, sehingga belum tersedia data pembanding dari periode sebelumnya.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 86,04%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 84,91%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 98,69% dengan akan tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	84,91	98,69	Akan Tercapai	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Balai POM di Tasikmalaya melakukan Kegiatan Penyebaran Informasi Sarana Pelayanan Kesehatan berupa KIE Farmakovigilans yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025 yang dilakukan secara daring. Pelaksanaan KIE yang dilakukan secara daring terbatas dalam memandu pengisian survey efektivitas KIE yang dilakukan oleh peserta.
- Pada TW I telah dilaksanakan KIE melalui Media Sosial yang dilakukan rutin setiap bulan mengedukasi masyarakat mengenai topik komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan, dan topik umum lainnya
- Selain itu Balai POM di Tasikmalaya telah melakukan program lainnya dalam rangka KIE yaitu “Ngulisik” yang dilakukan pada bulan Ramadan kepada para pedagang pangan kaki lima berupa ceramah langsung serta pembagian informasi berupa leaflet

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melaksanakan kegiatan KIE dengan metode yang disesuaikan dengan karakteristik audiens

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Melakukan evaluasi dari hasil survey efektivitas KIE yang telah dilakukan untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan KIE selanjutnya

3.1.4.2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah: (1) Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif; (2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; dan (3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Pengukuran Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tidak dapat dilakukan pada triwulan I dikarenakan intervensi program sekolah pangan aman ini akan selesai dilakukan maksimal di triwulan IV tahun 2025.

3.1.4.3. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawasan desa yang telah

diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki: (1) kader keamanan pangan desa yang aktif; (2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa; (3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Pengukuran Jumlah desa pangan aman berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman. Pengukuran indikator tersebut belum bisa dicapai pada triwulan I ini, dikarenakan desa pangan aman akan selesai dilakukan intervensi maksimal pada triwulan III tahun 2025.

3.1.4.4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pengukuran jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas. Pengukuran indikator tersebut belum bisa dicapai pada triwulan I ini, dikarenakan pasar pangan aman akan selesai dilakukan intervensi maksimal pada triwulan III tahun 2025.

3.1.5. Sasaran Kegiatan Ke-5

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

3.1.5.1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Ruang lingkup UMKM pada pangan mencakup usaha mikro dan kecil. Ruang lingkup UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi : 1) belum memiliki sertifikat cpotb tahap 1; dan 2) sudah memiliki sertifikat cpotb tahap 1 dan akan meningkat ke tahap ii atau tahap selanjutnya. MKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. UMKM yang memenuhi standar adalah UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK; UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3); UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara rata-rata jumlah UMK angan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB, jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap, dan Jumlah rekomendasi SPA CPKB.

Tabel 32. Capaian Kinerja Indikator “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” yang dilaksanakan triwulan I tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12	11,67	97,25	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 12% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di wilayah kerja UPT triwulan I tahun 2025 sebesar 11,67% dan jika nilai realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan I maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 97,25% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Capaian realisasi triwulan I belum dapat dilakukan perbandingan karena merupakan triwulan pertama pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan, sehingga belum tersedia data pembandingan dari periode sebelumnya.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 86,04%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 84,91%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 98,69% dengan akan tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan
 “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	11,67	12,82	Perlu Upaya Keras	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada bulan Maret 2025, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Tasikmalaya yang menetapkan UMK sebagai lokus pembinaan untuk Tahun Anggaran 2025.
- Dalam pelaksanaan pembinaan, terjadi perubahan tahapan, di mana kegiatan yang semula direncanakan berupa advokasi kepada lintas sektor dialihkan menjadi pelaksanaan sosialisasi pangan olahan kepada pelaku usaha, dengan target capaian persentase yang berbeda. Perubahan tahapan ini berpengaruh terhadap capaian target pada triwulan berjalan.
- Sebagai bentuk implementasi atas perubahan tersebut, kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha pangan olahan telah dilaksanakan pada bulan Maret 2025 secara daring, sesuai dengan tahapan pembinaan yang telah ditetapkan.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Sebagai respons terhadap perubahan tahapan pembinaan UMK, rencana pelaksanaan kegiatan telah disusun ulang guna memastikan kesesuaian dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Penyesuaian ini diharapkan dapat mengoptimalkan capaian output dan outcome program pada triwulan mendatang.
- Selain itu, dilakukan upaya komunikasi intensif dengan UMK yang menjadi lokus intervensi untuk mempercepat penerapan Good Manufacturing Practices (GMP). Langkah ini bertujuan untuk memperjelas alur pembinaan, mempercepat kemajuan progres UMK, serta memudahkan proses pemantauan dan evaluasi pemenuhan GMP oleh UMK secara berkala.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- **Penyusunan Ulang Rencana Kegiatan :** Penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan dengan tahapan pembinaan UMK terbaru memungkinkan kegiatan berjalan lebih adaptif dan terarah, sehingga meningkatkan peluang pencapaian target kinerja sesuai dengan rencana.
- **Sosialisasi Intensif kepada Pelaku Usaha:** Pelaksanaan sosialisasi pangan olahan kepada pelaku usaha secara tepat waktu, setelah adanya perubahan kebijakan, turut meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap standar Good Manufacturing Practices (GMP) dan mempercepat proses pembinaan.
- **Komunikasi Aktif dengan UMK:** Upaya komunikasi yang dilakukan secara aktif dengan UMK binaan berkontribusi terhadap peningkatan keterlibatan dan komitmen UMK dalam mengikuti tahapan pembinaan, serta memudahkan monitoring progres implementasi GMP.
- **Perubahan Tahapan Pembinaan:** Pergeseran tahapan dari advokasi lintas sektor menjadi sosialisasi langsung kepada pelaku usaha mengakibatkan perlunya penyesuaian cepat dalam rencana kerja, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan beberapa target triwulan.
- **Variasi Kesiapan UMK:** Tidak semua UMK memiliki tingkat kesiapan yang sama dalam menerapkan GMP, sehingga memerlukan intensitas pendampingan yang berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi kecepatan pencapaian output program.
- **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah tenaga pendamping maupun fasilitas pendukung sosialisasi yang hanya dapat dilaksanakan secara daring, dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan secara optimal.

3.1.6. Sasaran Kegiatan Ke-6

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT. Hasil capaian triwulan I tahun 2025 sebesar **141,65**

dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan**. Rincian hasil capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Triwulan I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	28,33	141,65	Tidak Dapat Disimpulkan	

3.1.5.1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut: (1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%; (2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%; (3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan (4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Tabel 35. Capaian Kinerja “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT” Triwulan I 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	28,33	141,65	Tidak Dapat Disimpulkan	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 20% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT triwulan I tahun 2025 sebesar 28,33% dan jika nilai realisasi

tersebut dihitung terhadap target triwulan I maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 141,65% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Capaian realisasi triwulan I belum dapat dilakukan perbandingan karena merupakan triwulan pertama pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan, sehingga belum tersedia data pembanding dari periode sebelumnya.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 83%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 28,33%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 34,13% dengan Perlu Upaya keras. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 36.

Tabel 36. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83	28,33	34,13	Perlu Upaya Keras	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada TW 1 Tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya menyelesaikan 1 (satu) berkas perkara carry over hingga mendapat surat P-21 dari Kejaksaan negeri ciamis Nomor B – 489/ M.2.25 / Eku.1 / 01 / 2025 tentang Pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama tersangka MUMU Bin H.ERI DAYARI (alm), yang disangka melanggar PRIMAIR : Pasal 136 huruf b Jo.Pasal 75 ayat (1) huruf b, SUBSIDAIR : Pasal 140 Jo.Pasal 86 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan KUHP Sudah lengkap pada tanggal 19 Januari 2025. Untuk perkara berjalan di Tahun 2025, Petugas Fungsi Penindakan Balai POM Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan operasi intelijen seperti pengumpulan bahan keterangan dan pengamatan/ penggambaran.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melaksanakan kegiatan Tahap II terhadap perkara Carry Over Tahun 2024;
- Melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan, pengawasan pengamatan penelitian dan pemeriksaan (wasmatlitrik) sebagai informasi awal untuk dilakukan operasi penindakan;
- Meningkatkan koordinasi dengan Criminal Justice System di kewilayahan.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Melakukan koordinasi terhadap Jaksa Penuntut Umum pemegang berkas perkara melalui Korwas Satuan Reskrim Polres Selaku Korwas PPNS untuk melaksanakan kegiatan Tahap II;
- Memanfaatkan alat khusus intelijen seperti Drone, Kamera dan Teropong sebagai sarana untuk mempermudah mendapatkan informasi Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

3.1.7. Sasaran Kegiatan Ke-7

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar. Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar 100% dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada table 37.

Tabel 37. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-7 Triwulan I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	Baik	
Nilai Pencapaian Sasaran			100	Baik	

3.1.6.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022; dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai: (1) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%); (2) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%); dan (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%).

Tabel 38. Capaian Kinerja Indikator “Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar” Triwulan I Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 50% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan I tahun 2025 sebesar 50% dan jika nilai

realisasi tersebut dihitung terhadap target triwulan I maka nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Capaian realisasi triwulan I belum dapat dilakukan perbandingan karena merupakan triwulan pertama pelaksanaan program pada tahun anggaran berjalan, sehingga belum tersedia data pembandingan dari periode sebelumnya.

3). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahunan

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 90%. Capaian yang diperoleh untuk indikator ini pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 50%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I tahun 2025 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 55,56% dengan Perlu Upaya keras. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 39. Perbandingan Realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT”

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realiasasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90	50	55,56	Perlu Upaya Keras	

4). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada TW 1 Tahun 2025, petugas fungsi Penindakan Balai POM Tasikmalaya telah melaporkan sebanyak 27 tautan temuan terkait kejahatan Obat dan Makanan di ranah siber melalui aplikasi inawebcrawler.id. Selain itu, petugas fungsi penindakan Balai POM Tasikmalaya telah melaporkan kegiatan profiling terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui aplikasi dashboard penindakan.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melaporkan patroli siber melalui aplikasi inawbercawler.id secara tepat waktu setiap bulannya;
- Melaporkan kegiatan profiling melalui aplikasi dashboard penindakan (penindakan.pom.go.id) secara tepat waktu setiap bulannya;

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Petugas melakukan patroli siber terhadap kejahatan Obat dan Makanan di ranah siber seperti Market Place/ Social Media yang kemudian dilaporkan melalui aplikasi inawebcrawler.
- Petugas melakukan profiling terhadap kejahatan Obat dan Makanan yang di ranah siber yang kemudian ditindak lanjuti dengan pengecekan lapangan secara langsung.

3.1.8. Sasaran Kegiatan Ke-8

Layanan Publik UPT yang prima

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: (1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); (2) Profesionalitas SDM (25%); (3) Sarana Prasarana (18%); (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); (5) Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan (6) Inovasi (12%). Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Pengukuran indikator Indeks Pelayanan Publik UPT dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Pengukuran indikator tersebut sebagian besar merupakan hasil survey oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.. Sehingga untuk Laporan Kinerja interim Triwulan I ini belum dapat diukur dan disajikan nilai capaiannya.

3.1.9. Sasaran Kegiatan Ke-9

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 3 (tiga) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Penjelasan lebih lanjut terkait 3 Indikator Kinerja penunjang sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

3.1.9.1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.. Penilaian Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM) dilakukan pada akhir Triwulan IV.

3.1.9.2. Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; (5) Capaian Kinerja. Indikator Nilai AKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai POM di Tasikmalaya yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI. Penilaian nilai AKIP UPT dilakukan pada akhir Triwulan IV.

3.1.9.3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan

pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: (1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Pengelolaan UP; (4) Rekon LPJ Bendahara; (5) Data Kontrak; (6) Penyelesaian Tagihan; (7) Penyerapan Anggaran; (8) Retur SP2D; (9) Perencanaan Kas (Renkas); (10) Pengembalian/Kesalahan SPM; (11) Dispensasi Penyampaian SPM; (12) Pagu Minus; dan (13) Konfirmasi Capaian Output. Penilaian nilai kinerja anggaran UPT dilakukan pada akhir triwulan IV.

3.1.9.4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: (1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan; (2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko; dan (3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko. Penilaian Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM belum dilakukan pada triwulan I ini.

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 40. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang	Petugas sampling kurang memahami konsep sampling	Meningkatkan pemahaman petugas pengambil sampel dalam melaksanakan	-	Petugas sampling melaksanakan pelatihan sampling secara mandiri untuk	-	-	Pelaksanaan sampling telah dilaksanakan sesuai dengan

	ditindaklanjuti sesuai ketentuan	sesuai pedoman sampling yang berlaku	sampling sesuai dengan pedoman sampling Meningkatkan kompetensi petugas dalam pengawasan penandaan sampel sediaan farmasi		memahami konsep sampling sesuai dengan pedoman yang berlaku Refreshment peraturan terkait pengawasan penandaan sampel			Pedoman Sampling Pelaksanaan pengawasan penandaan sesuai pedoman
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Petugas sampling kurang memahami konsep sampling sesuai pedoman sampling yang berlaku	Meningkatkan pemahaman petugas pengambil sampel dalam melaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling	-	Petugas sampling melaksanakan pelatihan sampling secara mandiri untuk memahami konsep sampling sesuai dengan pedoman yang berlaku	-	-	Pelaksanaan sampling telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Sampling
		Kesesuaian hasil pengawasan penandaan Pangan olahan oleh petugas UPT dengan evaluasi pusat rendah	Meningkatkan kompetensi petugas dalam pengawasan penandaan sampel pangan olahan	-	Refreshment peraturan terkait pengawasan penandaan sampel	-	-	Pelaksanaan pengawasan penandaan sesuai pedoman
3	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Petugas sampling kurang memahami konsep sampling sesuai pedoman sampling yang berlaku	Menindaklanjuti akibat dari kerusakan alat ICPMS di BBPOM Bandung	-	-	Melakukan koordinasi dengan BBPOM Bandung terkait parameter uji dan monitoring timeline sampel yang belum dapat dilaporkan terkait kerusakan alat ICPMS di	April 2025	Pelaksanaan sampling telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Sampling

						BBPOM Bandung		
4	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Terdapat risiko rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan timeline.	Meningkatkan monitoring dan follow up tindak lanjut rekomendasi	-	Monitoring tindak lanjut oleh PIC pemeriksaan telah diselesaikan sesuai timeline	-	-	Telah dilakukan monitoring terhadap seluruh rekomendasi dan telah ditindaklanjuti
		-	Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	-	Melaksanakan kegiatan forum koordinasi/advokasi dengan lintas sektor	November 2025	-
5	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan cara produksi yang baik	-	-	Melaksanakan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis bagi pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan cara produksi yang baik	April 2025	-
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-		-	-	-		-
7	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	-	Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	-	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, baik dalam kegiatan forum koordinasi	November 2025	-

	ti sesuai ketentuan					maupun advokasi		
8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-		-	-	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, baik dalam kegiatan forum koordinasi maupun advokasi		-
9	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan cara produksi yang baik	-	-	Melaksanakan kegiatan sosialisai/bimbingan teknis bagi pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan cara produksi yang baik	April 2025	-
10	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	Melakukan pemenuhan standar kompetensi penguji untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti bimbingan teknis maupun pelatihan	-	-	Memetakan kompetensi penguji dan kebutuhan kompetensi petugas pengujian untuk dilakukan peningkatan kompetensi dengan melaksanakan bimbingan teknis maupun pelatihan	Juni 2025	-
		-	Melakukan pengajuan rekomendasi alat untuk mendukung pengujian obat dan makanan yang dilakukan di	-	-	Melakukan pengajuan rekomendasi alat sesuai roadmap pengujian yang telah direncanakan	Februari 2025	-

			Balai POM Tasikmalaya sehingga mampu meningkatkan pemenuhan standar alat					
		-	Meningkatkan Standar Ruang Lingkup Pengujian sesuai dengan roadmap	-	-	Melakukan verifikasi metode dan melakukan pengujian sesuai dengan roadmap	Desember 2025	-
		-	Meningkatkan kelengkapan Metode Analisa SIMA	-	-	Melakukan Koordinasi dengan PPPOMN untuk melengkapi Metode Analisa SIMA	April 2025	-
11	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui ada UPT Balai POM di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya, sehingga tugas dan fungsi BPOM belum tersampaikan dengan baik	Meningkatkan publikasi terkait kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan oleh Balai POM di Tasikmalaya untuk menjangkau pelaku usaha yang lebih luas	-	Dilakukan publikasi mengenai peran BPOM di media sosial yang dimiliki Balai POM di Tasikmalaya diantaranya terkait Pengawasan yang telah dilakukan, penyebaran informasi terkait obat dan makanan. serta kegiatan pendampingan pelaku usaha	-	-	"Peningkatan jumlah followers pada sosial media Instagram yang dimiliki oleh Balai POM di Tasikmalaya yang menandakan semakin banyaknya Masyarakat yang mengetahui Balai POM di Tasikmalaya Jumlah Followers IG Januari : 2266 Jumlah Followers

					Telah dilakukan koordinasi dengan pemda di wilayah kerja seperti Kabupaten Tasikmalaya terkait pembahasan TKPPOM			IG April : 2327"
			Melakukan analisis kebutuhan terkait metode KIE agar dapat sesuai dengan karakteristik audience	-	-	Dilakukan penyesuaian metode KIE sesuai dengan karakteristik audiens	Mei 2025	-
12	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Penyebaran informasi pendampingan UMKM oleh Balai POM di Tasikmalaya belum diketahui pelaku usaha	Meningkatkan publikasi terkait kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan oleh Balai POM di Tasikmalaya untuk menjangkau pelaku usaha yang lebih luas	-	Rebranding terhadap program pendampingan dan meningkatkan publikasi terhadap pendampingan	-	-	Publikasi program SUKMA di Instagram dan dibuka pendaftaran pelaku usaha untuk ikut serta dalam pembinaan Balai POM di Tasikmalaya melalui bit.ly
		Monitoring terhadap permohonan sertifikasi masih belum optimal	Meningkatkan monitoring terhadap permohonan sertifikasi	-	Membuat sistem kerja anggota tim sertifikasi dengan link monitoring untuk sertifikasi yang diupdate secara berkala oleh ketua tim, serta	-	-	Permohonan sertifikasi telah dimonitoring sesuai dengan pembagian komoditi

					melaksanakan pembagian tim pelayanan sertifikasi			
13	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Terdapat pengembalian berkas perkara (P-19) dari Kejaksaan negeri ciamis	Menyelesaikan kekurangan berkas perkara agar berkas dapat dinyatakan lengkap	-	Menyampaikan berkas perkara yang sudah diperbaiki kekurangannya pada Kejaksaan negeri ciamis	-	-	Telah terdapat surat P-21 dari Kejaksaan negeri ciamis Nomor B – 489/ M.2.25 / Eku.1 / 01 / 2025 tentang Pemberitahuan hasil penyidikan perkara.
14	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	Optimalisasi sarana dan prasana yang tersedia dan melakukan permohonan penambahan sarana penunjang.	-	-	Melakukan pengadaan sarana penunjang pelayanan publik diantaranya seperti : Televisi/Monitor, Marking Tabs secara berkala, Stiker khusus kelompok rentan pada kursi tunggu.	April 2025	-
15	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	-	Meningkatkan kualitas pelaksanaan program RB di Balai POM Tasikmalaya	-	-	Melakukan sosialisasi kembali terkait implementasi RB	April 2025	-
16	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	Terdapat dokumen SAKIP yang belum di formalkan namun sudah diunggah pada subsite	Memastikan dokumen Perencanaan SAKIP yang diunggah pada subsite satuan kerja telah di	-	Telah dilakukan pengunggahan dokumen SAKIP yang telah diformalkan/dit	-	-	Dokumen SAKIP yang sebelumnya belum diformalkan telah ditandatangani dan

			formalkan/ditandatangani		andatangani pada subsite			diunggah kembali ke subsite sesuai ketentuan..
	Terdapat Matriks reuiu target belum dilengkapi dengan justifikasi	Memastikan Matriks reuiu target kinerja telah dilengkapi dengan justifikasi yang memadai pada saat proses penetapan target	-	Memberikan justifikasi pada saat penetapan target-target yang akan di tetapkan	-	-	Matriks reuiu target kinerja telah dilengkapi dengan justifikasi yang memadai pada saat proses penetapan target, justifikasi disusun berdasarkan rekomendasi unit pengampu, dan capaian tahun sebelumnya sehingga mendukung peningkatan kualitas perencanaan.	
	Pengisian identifikasi kendalan dan rencana tindak lanjut pada aplikasi simetris belum dilakukan secara tertib	Menyusun identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	-	Melakukan pengisian pengisian identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi simetris secara tertib	-	-	Pengisian identifikasi kendala dan RTL pada aplikasi Simetris telah dilakukan secara tertib. Hal ini meningkatkan n kualitas pemantauan dan evaluasi kinerja.	
	Masih terdapat kekurangan dalam	Menyusun laporan kinerja dengan	-	Telah dilakukan penyusunan laporan kinerja	-	-	Laporan kinerja telah disusun berdasarkan	

		penyusunan laporan kinerja diantaranya belum memuat - Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran - Matriks tindak lanjut atas seluruh rencana aksi periode sebelumnya - Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja secara memadai	memerhatikan pedoman SAKIP dan menyajikan - Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran - Matriks tindak lanjut atas seluruh rencana aksi periode sebelumnya - Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja secara memadai		dengan memerhatikan pedoman SAKIP			pedoman SAKIP. Kekurangan pada periode sebelumnya telah diperbaiki. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan kualitas laporan kinerja meningkat
		Masih terdapat perbedaan penulisan target dan realisasi kinerja pada dokumen SAKIP	Memastikan keselarasan penyajian target dan realisasi kinerja pada seluruh dokumen SAKIP.	-	Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan target dan realisasi pada dokumen SAKIP	-	-	Ketidaksesuaian antara target dan realisasi dapat dijelaskan secara transparan dalam matriks tersebut dan menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan kinerja berikutnya

		-	perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja dapat ditelusur/sesuai dengan dokumen monev (sumber data)			Melakukan verifikasi secara teliti pada sumber data penyusun capaian agar tidak terjadi kekeliruan pada hasil capaian	April 2025	-
			Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja terkait implementasi SAKIP			Membuat rencana pengembangan kompetensi tim Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja mengikuti pelatihan Implementasi SAKIP	Juni 2025	

3.3. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Balai POM di Tasikmalaya memperoleh anggaran sebesar Rp. 36.430.090.000,- (Tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) (DIPA Awal). Pada tanggal 22 Februari 2025 Balai POM di Tasikmalaya melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp 31.473.643.000,00- (Tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya menjadi Rp.4.956.447.000,- (Empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah). Pada tanggal 21 Maret 2025 terdapat relaksasi anggaran sebesar Rp. 1.018.279.000,-

(Satu milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga anggaran Balai POM di Tasikmalaya menjadi Rp.5.974.726.000 (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran pada triwulan I 2025 adalah sebesar Rp. 1.313.449.412,- (Satu milyar tiga ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) demikian nilai capaiannya 21.98%. Berdasarkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan indikator Sasaran kegiatan secara kumulatif masuk dalam kategori tidak efisien dengan nilai TE = 31,24. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 41. Realisasi Anggaran Balai POM di Tasikmalaya Triwulan I Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu TA 2024	Realisasi sd September 2024 (SAKTI)	Capaian Realisasi (%) (SAKTI)
Belanja Pegawai	1.672.520.000	447.150.960	26,74
Belanja Barang	4.320.566.000	782.266.332	18,11
Belanja Modal	30.437.004.000	84.032.120	0,28
Total	36.430.090.000	1.313.449.412	3,61

Berikut adalah alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

Tabel 42. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			T	R	%	T	R	%			
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	100	121,21	119.265.000	2.356.820	1,08	61,34	60,34	Tidak Efisien
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESQ	0	-	0	49.600.000	1.800.000	3,63	0,00	-1,00	Tidak Efisien
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100,00	133,33	23.755.000	898.475	3,66	36,47	35,47	Tidak Efisien
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	0	22.000.000	1.770.000	8,05	0,00	-1,00	Tidak Efisien
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90	105,88	23.755.000	898.475	3,66	28,98	27,98	Tidak Efisien
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	25	40,00	160,00	20.994.000	1.513.000	7,21	22,20	21,20	Tidak Efisien
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	100	107,53	42.134.000	1.149.488	2,73	39,41	38,41	Tidak Efisien
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	42.134.000	1.149.488	2,73	45,82	44,82	Tidak Efisien
9		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,63	100	110,34	156.776.500	3.520.000	2,25	49,14	46,14	Tidak Efisien
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	156.776.500	3.520.000	2,25	52,40	51,40	Tidak Efisien
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81,13	100	123,26	24.146.000	176.849	0,73	169,24	168,24	Tidak Efisien
12	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0	0	4.066.000	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7	7,2	102,86	1.754.367.000	1.753.000	0,10	1029,40	1028,40	Tidak Efisien
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	84,91	98,69	118.867.000	200.000	0,17	586,53	585,53	Tidak Efisien
15		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0,00	150.771.000	2.680.000	1,78	0,00	-1,00	Tidak Efisien
16		Jumlah desa pangan aman	0	0	0,00	127.135.000	1.620.000	1,43	0,00	-1,00	Tidak Efisien
17		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0,00	63.750.000	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara produksi OEA, Koz yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12	11,67	97,25	32.935.000	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	28,33	141,65	218.804.000	9.750.000	4,46	31,79	30,79	Tidak Efisien
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	52.935.000	5.080.000	9,61	10,40	9,40	Tidak Efisien
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	68.734.000	6.812.000	9,91	0,00	-1,00	Tidak Efisien
22	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	0	0	0	44.444.000	3.029.532	6,82	0,00	-1,00	Tidak Efisien
23		Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	0	0	0	17.418.000	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	0	0	0	33.027.071.000	1.263.833.285	3,83	0,00	-1,00	Tidak Efisien
25		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	67.844.000	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Jumlah			116,22	36.430.090.000	1.313.449.412	3,61	32,24	31,24	Tidak Efisien

Pada tabel 42 yang menjelaskan terkait Tingkat efisiensi anggaran maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja dari 25 indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 terdapat 20 indikator kinerja dengan kategori tidak efisien. Hal ini dikarenakan masih terdapat gap antara capaian kinerja dan anggaran dengan capaian realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan capaian kinerja sehingga penggunaan anggaran menjadi tidak efisien. Terdapat 5 indikator kinerja yang belum bisa dikategorikan dikarenakan belum terdapat capaian kinerja dan capaian anggaran pada triwulan I tahun 2025. Tingkat efisiensi anggaran akan dilakukan monitoring pada periode selanjutnya.

3.3.1 Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

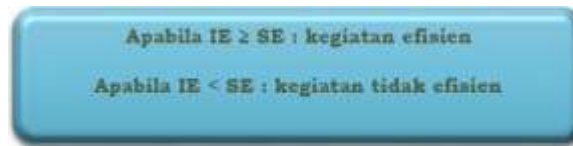
$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:



Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana). Tingkat Efisiensi Kegiatan pada triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 42.

Tabel 43. Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun Anggaran Triwulan I Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	SE	TE	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)				
1	Laporan Analisis Kejadian Obat dan Makanan oleh UPT	14	3	21,43	52.835.000	5.080.000	9,61	2,23	1	1,23	Tidak Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh Loka POM	21	6	28,57	68.734.000	6.812.000	9,91	2,88	1	1,88	Tidak Efisien
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	0	0	82.954.000	0	0,00	0	1	-1,00	Tidak Efisien
4	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0	293.000.000	6.604.000	2,25	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	20	3	15	35.913.000	200.000	0,56	26,93	1	25,93	Tidak Efisien
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	423.679.000	5.334.120	1,26	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
7	Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	7	7	100	100.000.000	78.698.000	78,70	1,27	1	0,27	Efisien
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0	28.651.930.000	0	0,00	0	1	-1,00	Tidak Efisien
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0	433.562.000	1.753.000	0,40	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
10	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tasikmalaya	2	0	0	218.804.000	9.750.000	4,46	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	4	0	0	150.771.000	2.680.000	1,78	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
12	Desa Pangan Aman	1	0	0	127.155.000	1.820.000	1,43	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
13	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	0	63.750.000	0	0,00	0	1	-1,00	Tidak Efisien
14	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100	49.600.000	1.800.000	3,63	27,56	1	26,56	Tidak Efisien
15	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	8	0	0	32.635.000	0	0,00	0	1	-1,00	Tidak Efisien
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	125	11	8,8	57.944.000	3.175.150	5,48	1,61	1	0,61	Efisien
17	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	250	6	2,4	129.825.000	2.431.620	1,87	1,28	1	0,28	Efisien
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	38	5	13,16	86.668.000	2.474.825	2,86	4,61	1	3,61	Tidak Efisien
19	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	3	0	0	4.066.000	0	0,00	0	1	-1,00	Tidak Efisien
20	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	371	37	9,97	357.302.000	8.810.000	2,47	4,04	1	3,04	Tidak Efisien
21	Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0	1.261.395.000	0	0,00	0	1	-1,00	Tidak Efisien
22	Layanan BMN	1	0	0,00	8.000.000	0	0,00	0	1	-1,00	Tidak Efisien
23	Layanan Perkantoran UPT	1	0	0,00	3.739.568.000	1.176.026.697	31,45	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
Jumlah				14,25	36.430.090.000	1.313.449.412	3,61	3,95	1	2,95	Tidak Efisien

Pada triwulan I tahun 2025, Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan 23 (dua puluh satu) rincian output Berdasarkan perhitungan dari rata-rata capaian kegiatan nilai efisiensi dari 23 output masuk pada kategori tidak efisien. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat gap antara capaian output dan anggaran sehingga penggunaan anggaran disetiap masing-masing program menjadi tidak efisien.

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai POM di Tasikmalaya Triwulan I Tahun 2025 mengukur pencapaian kinerja triwulan I tahun 2025 berdasarkan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berikut hasil pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025, yaitu: Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) sasaran kegiatan dan 25 Indikator kinerja dengan rincian 11 (sebelas) indikator kegiatan yang kriteria pencapaiannya sangat baik, 1 (satu) indikator kegiatan yang kriteria pencapaiannya baik, 2 (dua) indikator kegiatan yang kriteria pencapaiannya cukup dan 11 (sebelas) indikator belum bisa dilakukan pengukuran pada triwulan I tahun 2025. Dari sasaran kegiatan tersebut telah diukur berdasarkan 34 (tiga puluh empat) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: 13 (tiga belas) indikator kegiatan yang kriteria pencapaiannya sangat baik, 2 (dua) indikator kegiatan yang kriteria pencapaiannya baik, 3 (tiga) indikator kegiatan yang kriteria pencapaiannya cukup, 2 (dua) indikator kegiatan yang kriteria pencapaiannya kurang serta terdapat 14 (empat belas) indikator kegiatan yang belum dapat dilakukan pengukuran.

4.2. Saran

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran strategis pada triwulan I tahun 2025 merupakan dasar untuk menetapkan strategis dan inovasi pada triwulan selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh UPT di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya, antara lain:

- a. Koordinasi dengan lintas sektor sehingga inpres No. 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya.
- b. Menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

- c. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi
- d. Melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.
- e. Melaksanakan kegiatan untuk pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan ketentuan di bidang Obat dan Makanan.

LAMPIRAN 1.

RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI POM DI TASIKMALAYA TAHUN 2025



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA

Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Perum Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan,
Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya 46134 Telp. : (0265) 5305282
Email : bpom_tasikmalaya@pom.go.id ; Website : tasikmalaya.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TASIKMALAYA

NOMOR HK.02.02.16B.09.24.84 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TASIKMALAYA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

- 2 -

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya dalam melakukan penyusunan

- 3 -

rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal 19 September 2024



KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TASIKMALAYA

ILTIZAM NASRULLAH

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA

NOMOR HK.02.02.16B.09.24.84 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TASIKMALAYA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

- 5 -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	5
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85

- 6 -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	efektif di wilayah kerja UPT		
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		Nilai AKIP UPT BPOM	75
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	87
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2


 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 DI TASIKMALAYA
 ILTIZAM NASRULLAH

LAMPIRAN 2.

PERJANJIAN KINERJA BALAI POM DI TASIKMALAYA TAHUN 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILTIZAM NASRULLAH

Jabatan : Kepala Balai POM di Tasikmalaya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tasikmalaya, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Tasikmalaya

ILTIZAM NASRULLAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA TASIKMALAYA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.63 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	81.13 Persen
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60 Persen
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.04 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Jumlah

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persen
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83 Persen
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78,5 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 36,430,090,000 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	32,741,922,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,688,168,000

Tasikmalaya, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Tasikmalaya


ILTIZAM NASRULLAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI


TARUNA IKRAR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				A - PENGIRIMAN SAMPEL				10,560,000	10,560,000		
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan				A - PENGIRIMAN SAMPEL				10,434,000	10,434,000		
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	42,134,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - INTENSIFIKASI PENERTIBAN PRODUK ILEGAL/PENELUSURAN KASUS				39,568,000	19,784,000		
		2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PENGADAAN BAHAN DUKUNGAN KEGIATAN PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT				9,756,000	3,678,000		
		3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN				37,344,000	18,672,000		
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	42,134,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PENGADAAN BAHAN DUKUNGAN KEGIATAN PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT				9,756,000	3,678,000		
		2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN				37,344,000	18,672,000		
		3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - INTENSIFIKASI PENERTIBAN PRODUK ILEGAL/PENELUSURAN KASUS				39,568,000	19,784,000		
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	90.63	156,778,500
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN BIDANG PEMERIKSAAN				27,440,000	13,720,000				
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				S - PELATIHAN FI DASAR DI DKI JAKARTA				1,960,000	980,000				
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor,				K - PEMBENTUKAN INSPEKTUR JUNIOR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN DI DKI JAKARTA				1,860,000	980,000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN									ANGGARAN	KONTRIBUSI
			Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	makanan dan bahan berbahaya											
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	T - PELATIHAN FI MUDA DI DKI JAKARTA									1,960,000	980,000
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - PERKUATAN STRATEGI DAN PEMANTAPAN TEKNIS PENGAWASAN MUTU OBAT BEREDAR DI PADANG									7,681,000	3,840,500
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	H - FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR KOSMETIKA DI SUMATERA UTARA									9,569,000	4,784,500
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - PERKUATAN PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU LINTUK UPT BPOM DI BALIKPAPAN									9,734,000	4,867,000
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	L - PERTEMUAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI FARMAKOVIGILANS DI DKI JAKARTA									3,920,000	1,960,000
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	V - BIMBINGAN TEKNIS PENGAWAS PANGAN FORTIFIKASI DI DKI JAKARTA									1,960,000	980,000
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PERTEMUAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN									18,360,000	9,180,000
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN									168,220,000	84,110,000
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	M - PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK DI DKI JAKARTA									3,920,000	1,960,000
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	U - ON THE JOB TRAINING SARANA PRODUKSI AMDK DI DKI JAKARTA									1,960,000	980,000
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	N - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI/LOKA POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT BAHAN ALAM, OBAT KUASI, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK DI DKI JAKARTA									1,960,000	980,000

				TARGET													
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN		
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			E - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DI BANJARMASIN								7,677,000	3,838,500	
		16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN BIDANG PEMERIKSAAN								27,440,000	13,720,000	
		17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			P - PENGUATAN AKSI DAN STRATEGI PENANGANAN PEMBERANTASAN OBAT BAHAN ALAM (OBA) MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT (BKO) MELALUI PROGRAM KSATRIA NUSANTARA DI DKI JAKARTA								3,920,000	1,960,000	
		18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			I - EVALUASI SAMPLING KOSMETIK DI SURABAYA								3,024,000	1,512,000	
		19.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			Q - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS BADAN POM DAN UPT BADAN POM DALAM PENDAMPINGAN MONITORING EFEK SAMPLING OBA, OK DAN SK SERTA PENINGKATAN PERAN TENAGA MEDIS, PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT DI DAERAH								1,960,000	980,000	
		20.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			D - FORUM KOMUNIKASI PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI DAN PELAYANAN ONPP BENGKULU								6,972,000	3,486,000	
		21.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			R - PERENCANAAN DAN MONEV KINERJA PENGAWASAN SERTA PENGUATAN KOMPETENSI PENGAWAS SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN DI DKI JAKARTA								1,960,000	980,000	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	156,776,500		
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			H - FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR KOSMETIKA DI SUMATERA UTARA								9,569,000	4,784,500	
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN BIDANG PEMERIKSAAN								27,440,000	13,720,000	
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - PERTEMUAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN								18,360,000	9,180,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		4.	DR.3165.Q.IC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - FORUM KOMUNIKASI PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI DAN PELAYANAN ONPP BENGKULU								6,972,000	3,486,000	
		5.	DR.3165.Q.IC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DI BANJARMASIN								7,677,000	3,838,500	
		6.	DR.3165.Q.IC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	F - PERKUATAN STRATEGI DAN PEMANTAPAN TEKNIK PENGAWASAN MUTU OBAT BEREDAR DI PADANG								7,881,000	3,840,500	
		7.	DR.3165.Q.IC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	G - PERKUATAN PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU UNTUK UPT EPDM DI BALIKPAPAN								9,734,000	4,867,000	
		8.	DR.3165.Q.IC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	I - EVALUASI SAMPLING KOSMETIK DI SURABAYA								3,024,000	1,512,000	
		9.	DR.3165.Q.IC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	K - PEMBENTUKAN INSPEKTUR JUNIOR OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN DI DKI JAKARTA								1,960,000	980,000	
		10.	DR.3165.Q.IC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	L - PERTEMUAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI FARMAKOVIGILANS DI DKI JAKARTA								3,920,000	1,960,000	
		11.	DR.3165.Q.IC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	M - PELATIHAN SAMPLING OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK DI DKI JAKARTA								3,920,000	1,960,000	
		12.	DR.3165.Q.IC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	N - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI/LOKA POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT BAHAN ALAM, OBAT KUASI, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK DI DKI JAKARTA								1,960,000	980,000	
		13.	DR.3165.Q.IC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	P - PENGUATAN AKSI DAN STRATEGI PENANGANAN PEMBERANTASAN OBAT BAHAN ALAM (OBA) MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT (BKO) MELALUI PROGRAM KSATRIA NUSANTARA DI DKI JAKARTA								3,920,000	1,960,000	
		14.	DR.3165.Q.IC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Q - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS BADAN POM DAN UPT BADAN POM DALAM PENDAMPINGAN MONITORING EFEK SAMPLING OBA, OK DAN SK SERTA PENINGKATAN PERAN TENAGA MEDIS, PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT DI DAERAH								1,960,000	980,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
	15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		R - PERENCANAAN DAN MONEV KINERJA PENGAWASAN SERTA PENGUATAN KOMPETENSI PENGAWAS SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN DI DKI JAKARTA								1,960,000	980,000	
	16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		S - PELATIHAN FI DASAR DI DKI JAKARTA								1,960,000	980,000	
	17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		T - PELATIHAN FI MUDA DI DKI JAKARTA								1,960,000	980,000	
	18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		U - ON THE JOB TRAINING SARANA PRODUKSI AMDK DI DKI JAKARTA								1,960,000	980,000	
	19.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		V - BIMBINGAN TEKNIS PENGAWAS PANGAN FORTIFIKASI DI DKI JAKARTA								1,960,000	980,000	
	20.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN								166,220,000	84,110,000	
	21.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		A - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN BIDANG PEMERIKSAAN								27,440,000	13,720,000	
11 - Persentase iklan sedian farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan			81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	81.13	24,145,000	
	NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
	1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		A - PENGADAAN BAHAN DUKUNGAN KEGIATAN PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT								9,756,000	2,400,000	
	2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		O - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS UPT BADAN POM DALAM KESESUAIAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN IKLAN DAN PENANDAAN DI DKI JAKARTA								1,960,000	1,960,000	
	3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya		J - PERKUATAN PENGAWASAN IKLAN DAN PENANDAAN OBAT SESUDAH BEREDAR DI PADANG								7,725,000	7,725,000	
	4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		B - PEMANTAUAN IKLAN								12,060,000	12,060,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAROET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						20	20	20	60	60	60	60	4,066,000
			NO		RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PENGADAAN SAMPEL			1,096,000		1,096,000	
			2.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI			2,970,000		2,970,000	
3.	03 - Memperkuatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			7	7	7	10	10	10	12	12	12	14	1,754,357,000
			NO		RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium			A - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM			1,320,795,000		1,320,795,000	
			2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			A - PENGADAAN BAHAN PENDUKUNG LABORATORIUM			300,802,000		300,802,000	
			3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			B - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM			2,500,000		2,500,000	
			4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			C - REVITALISASI FUNGSI MOBIL KELILING			81,610,000		81,610,000	
			5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			A - PENINGKATAN KAPASITAS PENGUJIAN DI LOKA POM UNTUK KOBONAPZA			6,480,000		6,480,000	
			6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			B - PELATIHAN VERIFIKASI ALAT LABORATORIUM BALAI BESAR/BALAI/LOKA			2,260,000		2,260,000	
			7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar		056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			C - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BB/BPOM LABORATORIUM PENGEMBANGAN PENGUJIAN MIKROBIOLOGI DAN BIOLOGI MOLEKULER			5,980,000		5,980,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
			Kemampuan Laboratorium												
		8.	DR.3185.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			D - REGIONALISASI LABORATORIUM BPOM DI NTT							7,118,000	7,118,000
		9.	DR.3185.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			E - BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PENGUJIAN KOSMETIK UNTUK BALAI POM DAN LOKA POM							2,260,000	2,260,000
		10.	DR.3185.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			F - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA							24,552,000	24,552,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.04	86.04	88.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	86.04	118,867,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3185.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, informasi dan Edukasi oleh UPT			A - PENYEBARAN INFORMASI							56,913,000	56,913,000
		2.	DR.3185.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, informasi dan Edukasi oleh UPT			B - KIE MELALUI PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT/KEPRAMUKAAN/SEKOLAH							13,765,000	13,765,000
		3.	DR.3185.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, informasi dan Edukasi oleh UPT			C - PENYULUHAN ATAS PERMINTAAN PIHAK KETIGA							12,276,000	12,276,000
		4.	DR.3185.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			B - WEBINAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN							3,600,000	3,600,000
		5.	DR.3185.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			A - KIE MELALUI MEDIA CETAK/MEDIA ELEKTRONIK/MEDIA ONLINE							28,683,000	28,683,000
		6.	DR.3185.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			C - FORUM KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK							3,630,000	3,630,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			70	70	70	95	100	100	100	100	4	150,771,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3185.QDB.001 - Sekolah dengan pangan (ajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS			E - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN							9,190,000	9,190,000
		2.	DR.3185.QDB.001 - Sekolah dengan pangan (ajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			A - ADVOKASI KEAMANAN PANGAN LINTAS SEKTOR							21,375,000	21,375,000
		3.	DR.3185.QDB.001 - Sekolah dengan pangan (ajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			B - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA							10,286,000	10,286,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
	4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN								35,545,000	35,545,000	
	5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		B - BIMTEK KEAMANAN PANGAN								25,205,000	25,205,000	
	6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		D - KEGIATAN MOBIL LABORATORIUM KELILING								4,500,000	4,500,000	
	7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		F - PENGADAAN KIT EDUKASI								6,000,000	6,000,000	
	8.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		G - MONITORING DAN EVALUASI PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH								7,440,000	7,440,000	
	9.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		H - PENGAWALAN SEKOLAH YANG DIINTERVENSIKP PJAS								12,360,000	12,360,000	
	10.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		C - ADMINISTRASI PELAKSANAAN PROGRAM PJAS								12,000,000	12,000,000	
	11.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		I - PENDAMPINGAN PERSIAPAN LOMBA SEKOLAH								6,870,000	6,870,000	
	03 - Jumlah desa pangan aman					50	70	80	100	100	100	100	100	1	127,155,000
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa		A - OPERASIONAL PELAKSANAAN GERAKAN KEAMANAN PANGAN DESA								3,000,000	3,000,000		
2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa		B - FASILITASI KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN								15,322,000	15,322,000		
3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa		C - VERIFIKASI DALAM RANGKA LOMBA DESA								3,020,000	3,020,000		
4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa		D - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA								13,140,000	13,140,000		
5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya		A - PENGAWALAN DESA DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI								4,198,000	4,198,000		
6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa		A - WORKSHOP MONEV PELAKSANAAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN LINTAS SEKTOR								33,820,000	33,820,000		
7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		A - BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN DESA								23,135,000	23,135,000		
8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		B - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA								31,520,000	31,520,000		
04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas					25	50	70	100	100	100	100	100	1	63,750,000	
	NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi		B - KEGIATAN PENGIRIMAN SAMPEL								1,360,000	1,360,000		
2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi		C - KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA								2,720,000	2,720,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		3. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi				A - SAMPLING DAN PENGUJIAN SAMPEL DI PASAR				9,240,000				9,240,000
		4. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				A - SURVEI PASAR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA				2,760,000				2,760,000
		5. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung				A - PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG				30,360,000				30,360,000
		6. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				B - BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGELOLA PASAR DALAM RANGKA PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA				6,970,000				6,970,000
		7. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya				C - PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS PASAR DAN KAMPANYE PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA				10,340,000				10,340,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CFPPOB pangan olahan	2	9	12	42	52	62	72	75	85	85	85	91	32,635,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan				A - PENGUATAN PENDAMPINGAN UMKM MENUJU NIE DI UPT BADAN POM				19,920,000				19,920,000
		2. DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				E - FORUM KOMUNIKASI FASILITATOR UMKM OBAT BAHAN ALAM				2,160,000				2,160,000
		3. DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				D - BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR PENDAMPINGAN UMKM KOSMETIK				2,160,000				2,160,000
		4. DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				C - BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR PENDAMPINGAN UMKM OBAT BAHAN ALAM				2,160,000				2,160,000
		5. DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				B - WORKSHOP REGISTRASI PANGAN OLAHAN UNTUK FASILITATOR				2,635,000				2,635,000
		6. DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				A - BIMTEK PENERAPAN CPPOB/CPOTB/CPKB BAGI UMKM SECARA ONLINE				3,600,000				3,600,000
		06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	10	10	20	40	40	50	55	65	70	75	80	83	218,804,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA	055 - Pemberkasan				C - Gelar Perkara				1,704,000				1,704,000
		2. DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA	055 - Pemberkasan				D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum				3,600,000				3,600,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		3. DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA	055 - Pemberkasan				E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti				14,320,000				14,320,000
		4. DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmaltrik)				A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmaltrik				2,112,000				2,112,000
		5. DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmaltrik)				B - Pelaksanaan Wasmaltrik				38,472,000				38,472,000
		6. DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA	051 - Operasi Intelijen				A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				1,764,000				1,764,000
		7. DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA	051 - Operasi Intelijen				B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				44,968,000				44,968,000
		8. DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA	051 - Operasi Intelijen				C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				1,008,000				1,008,000
		9. DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan				A - Gelar Kasus dan Pelaporan				756,000				756,000
		10. DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP				A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP				1,008,000				1,008,000
		11. DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA	055 - Pemberkasan				B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara				3,408,000				3,408,000
		12. DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA	054 - Operasi Penindakan				A - Operasi Penindakan				40,400,000				40,400,000
		13. DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA	054 - Operasi Penindakan				B - Penangkapan dan Penahanan				12,540,000				12,540,000
		14. DR.3165.QCD.U03 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TASIKMALAYA	055 - Pemberkasan				A - Pemberkasan				52,744,000				52,744,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	52,835,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan				A - PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN				8,240,000				8,240,000
		2. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				A - PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME, DAN KOORDINASI PPNS BADAN POM				4,120,000				4,120,000
		3. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				B - FORUM KOORDINASI INTELIJEN DI BALI				6,055,000				6,055,000
		4. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				A - PENJEJAKAN				2,920,000				2,920,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan			C - PERJALANAN KOORDINASI/KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA ANALIS KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN							7,440,000	7,440,000
		6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			B - FORUM GROUP DISCUSSION KERAWANAN KASUS KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN							20,400,000	20,400,000
		7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan			C - FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI JAWA BARAT							3,660,000	3,660,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.4	68,734,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			A - AUDIT SARANA DALAM RANGKA SERTIFIKASI, LABELISASI HALAL, SURVEILEN							22,114,000	22,114,000
		2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			B - PELAYANAN PRIMA DAN BIMBINGAN TEKNIS E-REGISTRATION PENDAFTARAN							27,900,000	27,900,000
		3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			C - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI DALAM RANGKA JEMPUT BOLA REGISTRASI PANGAN OLAHAN							18,720,000	18,720,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												76	44,444,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	WA.038.4.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR							102,360,000	10,236,000
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			I - WORKSHOP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN(DIGITAL ARSIP)							2,260,000	2,260,000
		3.	WA.038.4.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			A - SOSIALISASI PENGELOLAAN BMN							8,000,000	8,000,000
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			H - PENYUSUNAN LK BPOM UNAUDITED TA 2024							9,090,000	9,090,000
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			M - PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK							2,260,000	2,260,000
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			P - RAPAT KOORDINASI NASIONAL SDM DI DENPASAR							5,818,000	5,818,000
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			N - PELATIHAN LEAD AUDITOR							2,260,000	2,260,000
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			R - RAPAT KOORDINASI TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (RAKONTEK PPI) BPOM TAHUN 2025							2,260,000	2,260,000
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			S - BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI							2,260,000	2,260,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												78.5	17,418,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI								36,450,000	36,450,000	
		18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH								9,000,000	9,000,000	
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Q - SEWA KENDARAAN BALAI POM DI TASIKMALAYA								286,080,000	286,080,000	
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - PENGADAAN OUTSOURCING CLEANING SERVICE/SATPAM/SOPIR BALAI POM TASIKMALAYA								597,504,000	597,504,000	
		21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR								102,360,000	92,124,000	
		22.	DR.3165.OBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	A - PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA								28,651,930,000	28,651,930,000	
		23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - PERJALANAN PIMPINAN /KONSULTASI/PERJALANAN LAINNYA								178,850,000	178,850,000	
		24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - OPERASIONAL PERKANTORAN								12,000,000	12,000,000	
04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM													2.85	67,844,000	
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	G - FORUM KOORDINASI ANALIS ANGGARAN BPOM DI MALANG								2,412,000	2,412,000	
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - SURVEILAN QMS ISO 9001:2015 LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA								690,000	690,000	
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - DIKLAT/SEMINAR/PELATIHAN ASN								15,156,000	15,156,000	
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - BIMTEK SAKIP DAN MONEV ONLINE								4,120,000	4,120,000	
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	T - BIMBINGAN TEKNIK UKPBJ BADAN POM TAHUN 2025 DI SURABAYA								5,848,000	5,848,000	
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	O - MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAK NON FISIK POM								2,260,000	2,260,000	
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - KEGIATAN RAPAT BALAI POM DI TASIKMALAYA								9,900,000	9,900,000	
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - SOSIALISASI PERATURAN BAGI PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR								2,260,000	2,260,000	
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - BIMTEK PENGELOLAAN BMN								2,260,000	2,260,000	
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - RAPAT EVALUASI NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN								5,818,000	5,818,000	
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL MELALUI PENINGKATAN JASMANI DAN ROHANI								12,600,000	12,600,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		U - AKSELERASI PENINGKATAN BELANJA PDN							4,520,000	4,520,000	
												Total	36,430,090,000		

Tasikmalaya, 12 February 2025

Kepala Balai POM di Tasikmalaya



ILTIZAM NASRULLAH

BALAI POM DI TASIKMALAYA TAHUN 2024

085888100533 

(0265) 5305282 

Balai POM di Tasikmalaya 

bpom.tasikmalaya 

bpom_tasikmalaya@pom.go.id 

Balai POM di Tasikmalaya 

bpomtasikmalaya 